



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN,
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat Jl. Bumijo No. 5 Yogyakarta Kode Pos 55231 Telepon (0274) 589091 Faksimile (0274) 550320
Pos-el dpupesdm@jogjaprovo.go.id Laman <http://dpupesdm.jogjaprovo.go.id>

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN,
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 23 TAHUN 2025**

TENTANG
PENILAIAN RISIKO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menerapkan manajemen risiko yang di dalamnya termasuk pengendalian kecurangan;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penilaian Risiko termasuk Penilaian Risiko Kecurangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-688/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor I Tahun 2021 tentang Konsultasi pengendalian Kecurangan
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian Risiko adalah keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, serta pelaporannya,
- (3) Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif;
- (4) Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya
- (5) Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi;
- (6) Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya;
- (7) Retensi risiko adalah keputusan untuk menerima dan mengelola suatu risiko;
- (8) Transfer risiko adalah keputusan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain.
- (9) Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh (9) Kecurangan

mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

- (10) Risiko operasional adalah risiko yang dapat terjadi dalam kegiatan operasional suatu organisasi/entitas
- (11) Risiko Kecurangan merupakan risiko yang dimiliki oleh setiap organisasi/entitas yang timbul karena adanya perilaku kecurangan yang dilakukan oknum tertentu sehingga mengakibatkan kerugian yang bersifat materi maupun non materi (reputasi)
- (12) Whistle Blowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
- (13) Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.
- (14) Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

- KEDUA : Maksud dan tujuan disusunnya Keputusan ini adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen risiko berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan tingkat kegiatan, termasuk didalamnya penilaian risiko kecurangan serta sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal
- (1) mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
 - (2) mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.
- KETIGA : Penerapan penilaian risiko mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-688/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah, yaitu dilakukan dengan proses yang meliputi:
- (1) Penetapan konteks/tujuan,
 - (2) Identifikasi risiko;
 - (3) Analisis Risiko; dan
 - (4) Pelaporan.
- KEEMPAT : Format tentang Penilaian Risiko berdasarkan indikator kinerja utama, tingkat kegiatan dan Penilaian Risiko Kecurangan pada

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 17 Februari 2025

KEPALA DPUPESDM,



ANNA RINA HERBRANTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 23 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 Februari 2025

TENTANG : Penilaian Risiko

KRITERIA PENILAIAN RISIKO OPERASIONAL
(Berdasarkan indikator kinerja utama, tingkat kegiatan)

SKALA DAMPAK RISIKO

Skor	Skala	Keterangan
5	Katastoprik	Sebagian besar tujuan/sasaran sub-kegiatan gagal dicapai.
4	Besar	Sebagian tujuan/sasaran sub-kegiatan gagal dicapai.
3	Sedang	Mengganggu pencapaian tujuan/sasaran sub-kegiatan secara signifikan.
2	Kecil	Mengganggu pencapaian tujuan/sasaran sub-kegiatan meskipun tidak signifikan.
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran subkegiatan secara umum.

SKALA KEMUNGKINAN

Skor	Skala	Keterangan
5	Hampir Pasti Terjadi	Frekuensi kejadian setiap bulan sekali
4	Sangat Sering Terjadi	Frekuensi kejadian lebih dari 1/2 tahun sekali
3	Sering Terjadi	Frekuensi kejadian lebih dari 1 tahun sekali
2	Kadang Terjadi	Frekuensi kejadian lebih dari 3 tahun sekali
1	Jarang Terjadi	Frekuensi kejadian lebih dari 5 tahun sekali

SKALA RISI

	5	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
PROBABILITAS	4	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
	3	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TINGGI	SANGAT TINGGI
	2	RENDAH	RENDAH	SEDANG	SEDANG	TINGGI
	1	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	SEDANG
			1	2	3	4

**PENANGANAN RISIKO
(RENCANA TINDAK PENGENDALIAN)
FORMAT REGISTER RISIKO**

Tingkat Risiko	Skala Risiko	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN
13 s.d. 25	SANGAT TINGGI	HINDARI RISIKONYA	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risikonya.
9 s.d. 12	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	Diperlukan tindakan untuk mengelola risikonya.
5 s.d.8	SEDANG	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdayanya.
1 s.d.4	RENDAH	TERIMA	Tidak diperlukan tindakan. Buat rencana darurat (contingency plan) dan terus lakukan monitoring.

(Berdasarkan indikator kinerja utama, tingkat kegiatan)

Nama OPD					• INSPEKTORAT D.I. YOGYAKARTA												
Tujuan																
Sasaran Strategis																
Indikator Kinerja Utama																
No	Na Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan	Sasar Sub. Kegiatan	Tujua kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	VC	uraia Dampak	penge ndalia Yang Ada	Status Resiko			Ronca Penge ndalian	pemilik Risiko/ penangg ungjawab	Tar get	
						Pemy ataan Risiko						Skor	Kate gori/ Perin gkat Risiko				
						(7)	(8)		(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

**KRITERIA PENILAIAN RISIKO KECURANGAN
SKALA DAMPAK RISIKO KECURANGAN**

Level	Skala Dampak	Kriteria Dampak		
		Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	Terdapat Penyimpangan	Kerugian Keuangan Negara/Daerah
5	Sangat Signifikan	Lebih dari 28 hari kalender	Dilakukan oleh Penanggung Jawab/PJ	>50%
4	Signifikan	Lebih dari 22 hari kalender s.d 27 hari	Dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawah PJ	31% sd 50%
3	Sedang	Lebih dari 15 hari kalender s.d 21 hari	Dilakukan oleh pejabat dua tingkat dibawah PJ	21% sd 30%
2	Kurang Signifikan	Lebih dari 8 hari kalender s.d 14 hari	Dilakukan oleh pejabat tiga tingkat dibawah PJ	10% sd 20%
1	Tidak Signifikan	Sampai dengan 7 hari kalender	Dilakukan oleh pejabat empat tingkat dibawah PJ	<10%

SKALA KEMUNGKINAN KECURANGAN

Skor	Skala	Kriteria Kemungkinan	
		% Kemungkinan Terjadi Dalam 1 Kejadian	Frekuensi Kemungkinan Terjadi
5	Sangat Sering	>41% kejadian risiko	Terjadi \geq 2 kali dalam sebulan
4	Sering	31 sd 40% kejadian risiko	Terjadi 12 kali dalam setahun
3	Sedang	21 sd 30% kejadian risiko	Terjadi 3 kali dalam setahun
2	Jarang	11 sd 20% kejadian risiko	Terjadi 2 kali dalam setahun
1	Jarang Sekali	<10% kejadian risiko	Terjadi 1 kali dalam setahun

SKALA RISIKO KECURANGAN (1)

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi / Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4	Sering	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
3	Kadang-kadang	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TINGGI	SANGAT TINGGI
2	Jarang	RENDAH	RENDAH	SEDANG	SEDANG	TINGGI
1	Sangat Jarang	RENDAH	RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI

SKALA RISIKO KECURANGAN (2)

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi / Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	5	10	15	20	25
4	Sering	4	8	12	16	20
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat Jarang	1	2	3	4	5

FORMAT PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

Nama OPD	: Dinas PUPESDM DIY
----------	---------------------

No	Aspek/Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak terkait	Jenis Risiko Kecurangan	Pemilik Risiko	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Urutan Dampak	Risiko Saat Ini (Current Risk)			Respon terhadap Risiko Kecurangan	
										Pengendalian yang Sudah Ada (Existing)				Skor Kemungkinan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14+12x13	15

PENILAIAN RISIKO



PENILAIAN RISIKO TAHUN 2025

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

			2025

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Bumijo No. 5, Yogyakarta Telepon (0274) 589091 Faksimile (0274) 550320

Website: dpupesdm.jogjaprov.go.id email: dpupesdm@jogjaprov.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Tujuan dan Manfaat	3
1.4 Ruang Lingkup	3
1.5 Metodologi	3
BAB II PROFIL DINAS PUPESDM DIY	4
2.1 Struktur Organisasi.....	4
2.2 Tugas dan Fungsi	5
2.3 Tujuan dan Sasaran	6
2.4 Kegiatan Utama (Core Business).....	8
BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO	13
3.1. Penilaian Risiko Berdasarkan Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	13
3.1.1. Kriteria Penilaian Risiko Kegiatan.....	13
3.1.2. Identifikasi Risiko Kegiatan.....	14
3.1.3. Analisis Risiko Kegiatan.....	16
3.2. Penilaian Risiko Kecurangan	27
3.2.1. Kriteria Penilaian Risiko Kecurangan.....	27
3.2.2. Identifikasi Risiko Kecurangan.....	28
3.2.3. Analisis Risiko Kecurangan	29
BAB IV KESIMPULAN.....	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

KATA PENGANTAR

Penerapan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mensyaratkan terbangunnya infrastruktur di setiap unsurnya. Salah satu infrastruktur yang harus dibangun adalah terbangunnya risk register di tingkat entitas dan kegiatan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 seluruh instansi pemerintah wajib untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta wajib menyelenggarakan SPIP. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta wajib dalam penyelenggaraan SPIP.

Diharapkan dengan tersusunnya peta risiko Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta nantinya dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan kegiatan pengendalian di tingkat entitas, tingkat kegiatan dan tahapan kegiatan, dalam rangka penyempurnaan pengendalian yang masih lemah dan mengurangi dampak atas risiko.

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Kepala Dinas PUPESDM



ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dalam pasal 13 ayat I mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari 2 tahap yaitu; (1) identifikasi risiko, dan (2) analisis risiko.

Adapun Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut beberapa pakar antara lain: Nurmalia Hasanah, dkk (2016:131) mengatakan bahwa: "Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan peraturan perundangundangan." Sedangkan Menurut Indra Bastian (2010:129), Sistem Pengendalian Intern adalah: "Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuranukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan menejemen."

Lebih lanjut pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Mahmudi (2010:20) "Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien.

Dari pengertian tersebut diatas tentunya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kedepan bisa menciptakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang handal ,efektif dan efisien.

1.2. Dasar Hukum

Dalam penyusunannya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007or 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah,
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lampiran IV);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
 17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta,
 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan Penilaian Risiko pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat sub-kegiatan termasuk aspek/tahapan kegiatan pada masing-masing subbagian;
2. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan/sasaran subkegiatan termasuk aspek/tahapan kegiatan pada masing-masing subbagian.

1.3.2. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam penilaian risiko adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pengendalian tahun-tahun berikutnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penilaian Risiko pada Tujuan, Sasaran dan Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi seluruh Bidang dan Balai yang berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari:

1. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
2. Bidang Bina Marga;
3. Bidang Cipta Karya;
4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Bidang Perumahan;
6. Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
7. Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral

Pada penilaian Risiko Kecurangan meliputi keseluruhan aspek / tahapan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral baik di Bidang dan Balai.

1.5. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta baik pada tahap identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming dan Focus Group Discussion yang melibatkan seluruh bidang beserta subbagian-subbagiannya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta dengan didampingi oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

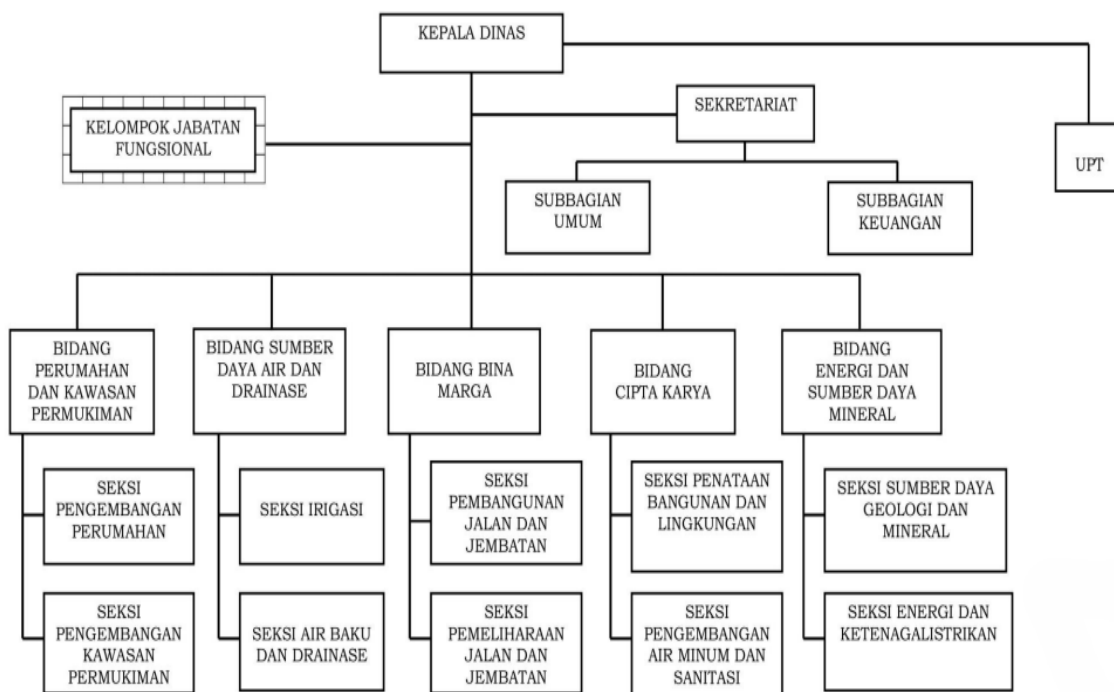
BAB II PROFIL DINAS PUPESDM DIY

2.1 Struktur Organisasi

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum; dan
 2. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Perumahan; dan
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
- d. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri atas:
 1. Seksi irigasi; dan
 2. Seksi Air Baku dan Drainase.
- e. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
 1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 2. Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi.
- g. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
 1. Seksi Sumber Daya Geologi dan Mineral; dan
 2. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
- h. Unit pelaksana teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada Bagan dibawah ini:



2.2 Tugas dan Fungsi

Bedasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.

Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- c. penyiapan bahan dan pembinaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- d. pengembangan dan pengelolaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- e. pengawasan dan pengendalian urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- f. fasilitasi pembinaan standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan serta kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- h. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- i. pelaksanaan pelayanan umum urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- j. fasilitasi pembinaan standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- n. penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- o. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;

- p. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta energi sumber daya mineral.
- q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai *cascade* kinerja yang tertuang dalam dokumen Renstra 2022-2027, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY mendukung pencapaian sasaran pemerintah daerah : penduduk berakses air minum, penduduk berakses sanitasi, penyediaan infrastruktur sumber daya air, peningkatan aksesibilitas jalan, peningkatan kinerja jasa konstruksi, rumah tangga yang menempati hunian layak, rumah tangga berakses listrik, meningkatnya kesesuaian perusahaan pertambangan terhadap pola ruang, terlaksananya upaya konservasi sumber daya air tanah melalui pengendalian rerata penurunan muka air tanah dalam kondisi aman, meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY selama lima tahun adalah:

- A. Urusan Pekerjaan Umum
 - 1. Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM.
 - 2. Meningkatkan kinerja daerah irigasi.
 - 3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY.
 - 4. Meningkatkan kualitas jasa konstruksi.
- B. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni.
- C. Urusan Energi Sumber Daya Mineral
 - 1. Meningkatkan cakupan pelayanan energi.
 - 2. Meningkatkan kegiatan perusahaan air tanah dan pertambangan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Adapun sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
				Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
1	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	94,77 %	95,47%	95,90%	96,32%	96,52%	96,72%	96,72%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
				Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
2	Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	96.42%	96.77%	97.09%	97.41%	97.73%	98.05%	98.05%
3	Penyediaan infrastruktur sumber daya air	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	64.06%	82.03%	85.94%	90.63%	95.31%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas Jalan	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	97.70%	98.27%	98.66%	98.77%	98.99%	100%	100%
5	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	N/A	81,65%	86,07%	90,72%	95,36%	100%	100%
6	Rumah Tangga yang menempati hunian layak	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	95.51%	95.67%	95.83%	95.98%	96.14%	96.30%	96.30%
7	Rumah Tangga Berakses Listrik	Persentase rumah tangga berakses listrik	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
8	Meningkatnya kesesuaian pengusahaan pertambangan terhadap pola ruang	Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	9.14%	9.18%	9.23%	9.28%	9.33%	9.38%	9.38%
9	Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman	Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%
10	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A

2.4 Kegiatan Utama (Core Business)

Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY merupakan implementasi dari 17 program yang dikelola oleh sekretariat, bidang dan balai. Kegiatan utama selanjutnya dijabarkan dalam sub kegiatan yaitu:

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			2	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi Dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			3	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Evaluasi Dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
			2	Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
			3	Pengelolaan Hidrologi Dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
			4	Operasi Dan Pemeliharaan Embung Dan Penampung Air Lainnya
		Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
			6	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
			7	Operasi Dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
			8	Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa
			9	Pengelolaan Dan Pengawasan Alokasi Air Di Daerah Irigasi
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dan Kawasan Strategis Provinsi	1	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1	Pembinaan Dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
			2	Pembangunan Pemanfaatan Pelestarian Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

6	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1	Pemeliharaan Rutin Jembatan
			2	Rehabilitasi Jalan
			3	Rekonstruksi Jalan
			4	Pemeliharaan Rutin Jalan
			5	Pelebaran Jalan Menuju Standar
			6	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi Dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan
			7	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD
			3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	
		5	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
		6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		7	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	2		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		4	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	
		5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	
		2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	

8	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten	1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
			2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
			3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
			4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo
9	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Budaya
		Pengembangan Kearifan Lokal Dan Potensi Budaya	1	Pengembangan Lumbung Mataraman
10	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	1	Pendataan Dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi
			2	Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Provinsi
11	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	1	Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	1	Penghitungan Perumusan Dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
			2	Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
12	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1	Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan Dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
			2	Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1	Penyusunan Dan Perumusan Rekomendasi Perizinan Dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan		Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
13	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari Angin Aliran Dan Terjunan Air Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi	1	Pembinaan Dan Pengawasan Aneka EBT (Kapasitas Terpasang Investasi) Di Daerah
			2	Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT
14	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	1	Penetapan Prosedur Dan Persyaratan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi
			2	Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi
BALAI PALPJK				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			2	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			4	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
			5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara
3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1	Penyediaan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi

		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 800 lembaga
			2	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

BAB III HASIL PENILAIAN RESIKO

3.1. Penilaian Risiko Berdasar Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.1.1. Kriteria Penilaian Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Skala Dampak Risiko

Skala penilaian dampak risiko pada penilaian risiko di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan skala 5 (lima), dengan deskripsi sebagai berikut:

Skor	Skala	Keterangan
5	Katastropik	Sebagian besar tujuan/sasaran sub-kegiatan gagal dicapai.
4	Besar	Sebagian tujuan/sasaran sub-kegiatan gagal dicapai.
3	Sedang	Mengganggu pencapaian tujuan/sasaran sub-kegiatan secara signifikan.
2	Kecil	Mengganggu pencapaian tujuan/sasaran sub-kegiatan meskipun tidak signifikan.
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran sub-kegiatan secara umum.

2. Skala Kemungkinan

Skala penilaian kemungkinan yang dipergunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan skala 5 (lima) dengan deskripsi sebagai berikut :

Skor	Skala	Keterangan
5	Hampir Pasti Terjadi	Frekuensi kejadian setiap bulan sekali
4	Sangat Sering Terjadi	Frekuensi kejadian lebih dari 1/2 tahun sekali
3	Sering Terjadi	Frekuensi kejadian lebih dari 1 tahun sekali
2	Kadang Terjadi	Frekuensi kejadian lebih dari 3 tahun sekali
1	Jarang Terjadi	Frekuensi kejadian lebih dari 5 tahun sekali

3. Skala Risiko

Matrik risiko yang digunakan dalam penilaian risiko pada pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 5 x 5 dengan deskripsi sebagai berikut :

PROBABILITAS	5	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
	4	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
	3	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TINGGI	SANGAT TINGGI
	2	RENDAH	RENDAH	SEDANG	SEDANG	TINGGI
	1	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	SEDANG
		1	2	3	4	5
		DAMPAK				

3.1.2. Identifikasi Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 memiliki 32 risiko atas Kegiatan Utama dan penunjang yang keseluruhan dikelola oleh Bidang dan Balai, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	2025		
		Sebab	Risiko	Dampak
1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	9	9	9
2	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12	12	12
3	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21	21	21
4	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	8	8	8
5	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dan Kawasan Strategis Provinsi	3	3	3
6	Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2	2	2
7	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	63	63	63
8	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	14	14
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9	9	9
10	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2	2	2
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11	11	11
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	1
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	7	7
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4

15	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten	27	27	27
16	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	12	12	12
17	Pengembangan Kearifan Lokal Dan Potensi Budaya	7	7	7
18	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	5	5	5
19	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	3	3	3
20	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	1	1	1
21	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1	1	1
22	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	2	2	2
23	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3	3	3
24	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	1	1	1
25	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari Angin Aliran Dan Terjunan Air Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi	1	1	1
26	Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	1	1	1
Balai PALPJK				
27	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	3	3
28	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1	1	1
29	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	9	9
30	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4
31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	3
32	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	10	10	10
33	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	2	2	2
34	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1	1	1

3.1.3. Analisa Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

Hasil Analisa risiko dilakukan Tim Manajemen Risiko Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisa risiko adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0
5 s.d. 8	Sedang	13
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		13

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	2
5 s.d. 8	Sedang	5
1 s.d. 4	Rendah	4
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		11

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	4
5 s.d. 8	Sedang	2
1 s.d. 4	Rendah	2
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		8

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil Analisa risiko pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	4
9 s.d. 12	Tinggi	0
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		4

6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	7
5 s.d. 8	Sedang	2
1 s.d. 4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		10

7. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0
5 s.d. 8	Sedang	2
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		2

8. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	6
5 s.d. 8	Sedang	1
1 s.d. 4	Rendah	5
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		12

9. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	19
5 s.d. 8	Sedang	2
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		21

10. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	2
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		3

11. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	5
5 s.d. 8	Sedang	4
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		9

12. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	2
5 s.d. 8	Sedang	5
1 s.d. 4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		8

13. Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	1
5 s.d. 8	Sedang	1
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		2

14. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	4
5 s.d. 8	Sedang	12
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		16

15. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	1
9 s.d. 12	Tinggi	2
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	2
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		5

16. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	SangatTinggsi	0
9 s.d. 12	Tinggi	6
5 s.d. 8	Sedang	1
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		7

17. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan P Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	4
9 s.d. 12	Tinggi	4
5 s.d. 8	Sedang	1
1 s.d. 4	Rendah	3
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		12

18. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	25
5 s.d. 8	Sedang	39
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		64

19. Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	1
5 s.d. 8	Sedang	2
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		3

20. Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	1
9 s.d. 12	Tinggi	1
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		2

21. Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	2
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		2

22. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut.

Hasil Analisa risiko pada Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut pada Dinas

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	1
9 s.d. 12	Tinggi	0
5 s.d. 8	Sedang	2
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		3

23. Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	1
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	3
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		4

24. Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0
5 s.d. 8	Sedang	1
1 s.d. 4	Rendah	3
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		4

25. Kegiatan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	1
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

26. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	1
9 s.d. 12	Tinggi	0
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

27. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	1
9 s.d. 12	Tinggi	8
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		10

28. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	2
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	2
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		4

29. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

30. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	3
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		3

31. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0

5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

32. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	7
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	2
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		9

33. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	3
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		4

34. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Hasil Analisa risiko pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	3
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		3

3.2. Penilaian Risiko Kecurangan

3.2.1. Kriteria Penilaian Risiko Kecurangan

1. Skala Dampak Risiko

Skala penilaian dampak risiko pada penilaian risiko kecurangan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan skala 5 (lima), dengan deskripsi sebagai berikut:

Level	Skala Dampak	Kriteria Dampak		
		Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	Terdapat Penyimpangan	Kerugian Keuangan Negara Daerah
5	Sangat Signifikan	Lebih dari 28 hari kalender	Dilakukan Oleh Penanggung Jawab PJ	>50%
4	Signifikan	Lebih dari 22 hari kalender s.d 27 hari	Dilakukan Oleh pejabat satu tingkat dibawah Pj	31% sd 50%
3	Sedang	Lebih dari 15 hari kalender s.d 21 hari	Dilakukan Oleh pejabat dua tingkat dibawah PJ	21% sdv30%
2	Kurang Signifikan	Lebih dari 8 hari kalender s.d 14 hari	Dilakukan Oleh pejabat tiga tingkat dibawah PJ	10% sd 20%
1	Tidak Signifikan	Sampai dengan 7 hari kalender	Dilakukan Oleh pejabat empat tingkat dibawah PJ	< 10 ⁰ /0

2. Skala Kemungkinan

Skala penilaian kemungkinan yang dipergunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan skala 5 (lima) dengan deskripsi sebagai berikut:

Skor	Skala	Kriteria Kemungkinan	
		% Kemungkinan Terjadi Dalam 1 Kejadian	Frekuensi Kemungkinan Terjadi
5	Sangat Sering	>41% kejadian risiko	Terjadi >=2 kali dalam sebulan
4	Sering	31 sd 40% kejadian risiko	Terjadi 12 kali dalam setahun
3	Sedang	21 sd 30% kejadian risiko	Terjadi 3 kali dalam setahun
2	Jarang	11 sd 20% kejadian risiko	Terjadi 2 kali dalam setahun
1	Jarang Sekali	< 10% kejadian risiko	Terjadi 1 kali dalam setahun

3. Skala Risiko

Matrik risiko yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 5 x 5 dengan deskripsi sebagai berikut:

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi / Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4	Sering	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
3	Kadang-kadang	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TINGGI	SANGAT TINGGI
2	Jarang	RENDAH	RENDAH	SEDANG	SEDANG	TINGGI
1	Sangat Jarang	RENDAH	RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi / Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Tidak Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	5	10	15	20	25
4	Sering	4	8	12	16	20
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat Jarang	1	2	3	4	5

3.2.2. Identifikasi Risiko Kecurangan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 telah memetakan adanya 20 Risiko Kecurangan dalam 8 (enam) Aspek/Tahapan Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Aspek/Tahapan Kegiatan	2025		
		Sebab	Risiko	Dampak
1.	Urusan PUPKP & ESDM	9	5	12
2.	Transaksi Pendapatan	1	1	1
3.	Transaksi Pengeluaran	3	3	3
4.	Pengadaan Baran dan Jasa	6	4	4
5.	Sumber Daya Manusia SDM	2	1	1
6.	Aset dan Persediaan	4	3	6
7.	Teknologi Informasi	1	1	3
8.	Sistem Komunikasi dan Pelaporan	4	2	4

3.2.3. Analisa Risiko Kecurangan

Analisa risiko dilakukan Tim Manajemen Risiko dengan mengadakan Forum Group Discussion bersama dengan seluruh perenangku kepentingan yang terlibat pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil analisa risiko kecurangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Aspek / Tahapan Kegiatan Pengawasan

Hasil Analisa risiko pada Aspek /Tahapan Kegiatan Urusan PUPKP & ESDM pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	2
4 s.d. 8	Sedang	3
1 s.d.4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		5

2. Aspek / Tahapan Kegiatan Transaksi Pendapatan

Hasil Analisa risiko pada Aspek / Tahapan Kegiatan Transaksi Pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0
4 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d.4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

3. Aspek / Tahapan Kegiatan Transaksi Pengeluaran

Hasil Analisa risiko pada Aspek / Tahapan Kegiatan Transaksi Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0
4 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d.4	Rendah	3
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		3

4. Aspek / Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil Analisa risiko pada Aspek / Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	2
4 s.d. 8	Sedang	2
1 s.d.4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		4

5. Aspek / Tahapan Kegiatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hasil Analisa risiko pada Aspek / Tahapan Kegiatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0
4 s.d. 8	Sedang	1
1 s.d.4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

6. Aspek / Tahapan Kegiatan Aset dan Persediaan

Hasil Analisa risiko pada Aspek / Tahapan Kegiatan Aset dan Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	1
9 s.d. 12	Tinggi	1
4 s.d. 8	Sedang	1
1 s.d.4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		3

7. Aspek / Tahapan Kegiatan Teknologi Informasi

Hasil Analisa risiko pada Aspek / Tahapan Kegiatan Teknologi Informasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0
4 s.d. 8	Sedang	1
1 s.d.4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

8. Aspek / Tahapan Kegiatan Sistem Komunikasi dan Pelaporan

Hasil Analisa risiko pada Aspek / Tahapan Kegiatan Sistem Komunikasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut.

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	1
4 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d.4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		2

BAB IV KESIMPULAN

Dari hasil penilaian risiko berdasar pada Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diambil kesimpulan.

A. Risiko dengan kategori "Sangat Tinggi" berjumlah 13 risiko dengan rincian:

1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada 4 risiko
2. Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi ada 1 risiko
3. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan ada 4 risiko
4. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi ada 1 risiko
5. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil ada 1 risiko
6. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut ada 1 risiko
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada 1 risiko

B. Risiko dengan kategori "Tinggi" berjumlah 133 risiko dengan rincian:

1. Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ada 13 risiko
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah ada 2 risiko.
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada 4 risiko
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ada 7 risiko
5. Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ada 6 risiko
6. Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ada 19 risiko
7. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dan Kawasan Strategis Provinsi ada 2 risiko
8. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota ada 5 risiko
9. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional ada 2 risiko
10. Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi ada 1 risiko
11. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten ada 4 risiko
12. Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi ada 2 risiko
13. Pengembangan Kearifan Lokal Dan Potensi Budaya ada 6 risiko
14. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan ada 4 risiko
15. Penyelenggaraan Jalan Provinsi ada 25 risiko
16. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi ada 1 risiko
17. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat ada 2 risiko
18. Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi ada 1 risiko
19. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan ada 1 risiko

20. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada 8 risiko
21. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional ada 2 risiko
22. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ada 3 risiko
23. Administrasi Umum Perangkat Daerah ada 7 risiko
24. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada 3 risiko
25. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi ada 3 risiko

C. Risiko dengan kategori "Sedang" berjumlah 98 risiko dengan rincian:

1. Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ada 1 risiko
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah ada 4 risiko.
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada 2 risiko
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ada 2 risiko
5. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah ada 2 risiko
6. Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ada 6 risiko
7. Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ada 2 risiko
8. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota ada 4 risiko
9. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional ada 5 risiko
10. Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi ada 1 risiko
11. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten ada 25 risiko
12. Pengembangan Kearifan Lokal Dan Potensi Budaya ada 1 risiko
13. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan ada 1 risiko
14. Penyelenggaraan Jalan Provinsi ada 35 risiko
15. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi ada 2 risiko
16. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil ada 2 risiko
17. Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari Angin Aliran Dan Terjunan Air Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi ada 1 risiko

D. Risiko dengan kategori "Rendah" berjumlah 33 risiko dengan rincian:

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah ada 4 risiko
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ada 1 risiko
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada 2 risiko
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ada 1 risiko
5. Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ada 5 risiko
6. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dan Kawasan Strategis Provinsi ada 1 risiko
7. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional ada 1 risiko
8. Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi ada 2 risiko
9. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan ada 3 risiko
10. Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi ada 3 risiko

11. Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari Angin Aliran Dan Terjunan Air Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi ada 3 risiko
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada 1 risiko
13. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional ada 2 risiko
14. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi ada 1 risiko
15. Administrasi Umum Perangkat Daerah ada 2 risiko
16. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada 1 risiko

Dari hasil penilaian risiko kecurangan pada 8 Aspek/Tahapan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diambil kesimpulan:

1. Risiko dengan kategori "Sangat Tinggi" berjumlah 1 risiko dengan rincian:
 - a. Aspek/Tahapan Kegiatan Aset dan Persediaan ada I RISIKO
2. Risiko dengan kategori "Tinggi" berjumlah 6 risiko dengan rincian:
 - a. Aspek/Tahapan Kegiatan Urusan PUPKP & ESDM ada 2 RISIKO
 - b. Aspek/Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa ada 2 RISIKO
 - c. Aspek/Tahapan Kegiatan Aset dan Persediaan ada I RISIKO
 - d. Aspek/Tahapan Kegiatan Sistem Komunikasi dan Pelaporan ada I RISIKO
3. Risiko dengan kategori "Sedang" berjumlah 8 risiko dengan rincian:
 - a. Aspek/Tahapan Kegiatan Urusan PUPKP & ESDM ada 3 RISIKO
 - b. Aspek/Tahapan Kegiatan Pengadaan Baran dan Jasa ada 2 RISIKO
 - c. Aspek/Tahapan Kegiatan Sumber Daya Manusia SDM ada 1 RISIKO
 - d. Aspek/Tahapan Kegiatan Aset dan Persediaan ada 1 RISIKO
 - e. Aspek/Tahapan Kegiatan Teknologi Informasi ada I RISIKO
4. Risiko dengan kategori "Rendah" berjumlah 4 risiko dengan rincian:
 - a. Aspek/Tahapan Kegiatan Transaksi Pendapatan ada 1 RISIKO
 - b. Aspek/Tahapan Kegiatan Transaksi Pengeluaran ada 3 RISIKO
 - c. Aspek/Tahapan Kegiatan Sistem Komunikasi dan Pelaporan ada 1 RISIKO

LAMPIRAN

1. MATRIKS REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY TAHUN 2025
2. PENILAIAN KECURANGAN/ *FRAUD ASSESMENT* (FRA) DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY TAHUN 2025
3. MATRIKS RISIKO FINAL SPBE DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY TAHUN 2025
4. REGISTER RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY TAHUN 2025

NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY
TUJUAN : Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral
SASARAN STRATEGIS : 1. Penduduk Berakses Air Minum

2. Penduduk Berakses Sanitasi
3. Penyediaan infrastruktur sumber daya air
4. Peningkatan aksesibilitas Jalan
5. Peningkatan kinerja jasa konstruksi
6. Rumah Tangga yang menempati hunian layak
7. Rumah Tangga Berakses Listrik
8. Meningkatnya kesesuaian pengusahaan pertambangan terhadap pola ruang
9. Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman
10. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA : 1. Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak
2. Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak
3. Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air
4. Persentase Pembangunan Jaringan Jalan
5. Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi
6. Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni
7. Persentase rumah tangga berakses listrik
8. Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang
9. Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah
10. Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

No.	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
				No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tersusunnya ROPK Subkegiatan Tahun 2025)	1 Keterlambatan penyusunan ROPK 2025	Kurangnya koordinasi di internal Bidang/Balai	C	Terlambat mengentri dalam aplikasi sengguh	1. Koordinasi internal dengan bidang/balai 2. Koordinasi dengan Bapperida apabila aplikasi sengguh telah dikunci	2	3	6	Sedang	1. Koordinasi internal dengan bidang/balai 2. Koordinasi dengan Bapperida	Sekretaris Dinas PUPESDM DIY	Januari - Februari 2025	
			2 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Terlaksananya penyusunan Renja SKPD Perubahan Tahun 2025)	1 Keterlambatan penyusunan Renja SKPD Perubahan Tahun 2025	Menunggu pengesahan dokumen DPAP 2025	C	terlambatnya penyusunan ROPK P	Koordinasi dengan Bapperida dan BPKA	2	3	6	Sedang	Koordinasi dengan Bapperida dan BPKA	Sekretaris Dinas PUPESDM DIY	Juni - November 2025	
			3 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Terlaksananya penyusunan Renja SKPD Tahun 2025)	1 Keterlambatan pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026	Pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan kegiatan	C	terlambatnya penyusunan ROPK	Koordinasi dengan Bapperida	3	3	9	Sedang	Koordinasi dengan Bapperida	Sekretaris Dinas PUPESDM DIY	Januari - Juli 2025	
			4 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025)	1 Ketidakesesuaian penyajian perjanjian kinerja dengan Target dalam Renja	SDM tidak teliti	C	Perbedaan penetapan tujuan Perangkat Daerah	Koordinasi dengan Biro Organisasi	2	3	6	Sedang	Koordinasi dengan Biro Organisasi	Sekretaris Dinas PUPESDM DIY	Januari - Februari 2025	

2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Terlaksananya Penyusunan DPA)	1	Keterlambatan penyusunan DPA 2025	Keterlambatan penyampaian usulan program dan kegiatan dari bidang/balai	C	Skala prioritas program dan kegiatan dari bidang/balai tidak tersampaikan lengkap dengan readiness criteria	Koordinasi dengan bidang/balai lebih efektif	2	3	6	Sedang	Koordinasi dengan bidang balai/balai terkait kesesuaian rencana program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang ada	Sekretaris Dinas PUPESDM DIY	Januari - Maret & Sep - Desember 2025
		2	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Tersedianya data pendukung Penyusunan RKA-P)	1	Keterlambatan penyusunan DPA Perubahan 2025	Keterlambatan penyampaian usulan program dan kegiatan dari bidang/balai	C	Skala prioritas program dan kegiatan dari bidang/balai tidak tersampaikan lengkap dengan readiness criteria	Koordinasi dengan bidang/balai lebih efektif	2	3	6	Sedang	Koordinasi dengan bidang balai/balai terkait kesesuaian rencana program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang ada	Sekretaris Dinas PUPESDM DIY	Juni - November 2025
		3	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Terlaksananya Penyusunan RKA)	1	Keterlambatan penyusunan RKA Tahun 2025	Keterlambatan pengumpulan data anggaran dari Bidang/Balai	C	Skala prioritas program dan kegiatan dari bidang/balai tidak tersampaikan lengkap dengan readiness criteria	Koordinasi dengan Bapperida, Biro organisasi dan BPKA dan bidang/balai	2	3	6	Sedang	Koordinasi dengan Bapperida, Biro organisasi dan BPKA dan bidang/balai	Sekretaris Dinas PUPESDM DIY	Januari - Oktober 2025
		4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Terlaksananya Penyusunan RKA-P)	1	Keterlambatan penyusunan RKA-P Tahun 2025	Keterlambatan pengumpulan data anggaran dari Bidang/Balai	C	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan perubahan	Koordinasi dengan Bapperida, Biro organisasi dan BPKA	2	3	6	Sedang	Koordinasi dengan Bapperida, Biro organisasi dan BPKA	Sekretaris Dinas PUPESDM DIY	Juni - September 2025
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Terlaksananya Penyusunan Konsep LKPJ Urusan PU, Perumahan dan ESDM Tahun 2024)	1	Keterlambatan penyusunan Dokumen LKPJ	Memerlukan data lintas seksi Bidang/ Balai	C	Nilai evaluasi LKPJ rendah	Koordinasi dengan bidang/balai lebih efektif	2	3	6	Sedang	Koordinasi dengan bidang balai/balai terkait kesesuaian rencana program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang ada	Sekretaris Dinas PUPESDM DIY	Januari - Maret 2025
		2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Terlaksananya Penyusunan Konsep LPPD Urusan PU, Perumahan dan ESDM Tahun 2024)	1	Keterlambatan penyusunan Dokumen LPPD	Memerlukan data lintas seksi Bidang/ Balai	C	Terlambatnya Dokumen LPPD	Koordinasi dengan bidang/balai lebih efektif	2	3	6	Sedang	Koordinasi dengan bidang balai/balai terkait kesesuaian rencana program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang ada	Sekretaris Dinas PUPESDM DIY	Januari - Maret 2025
		3	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025)	1	Keterlambatan penyusunan Dokumen Monev Pelaksanaan Program karena entry terlambat	Sering terjadi perubahan DPA SKPD	C	Laporan terlambat	Koordinasi dengan bidang/balai lebih efektif	2	3	6	Sedang	Koordinasi dengan bidang balai/balai terkait kesesuaian rencana program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang ada	Sekretaris Dinas PUPESDM DIY	Januari - Desember 2025
		4	Tersusunnya LKJIP Tahun 2024 Dinas PUPESDM DIY	1	Keterlambatan penyusunan Dokumen LKJIP	Memerlukan data lintas seksi Bidang/ Balai	C	Nilai evaluasi LKJIP rendah	Koordinasi dengan bidang/balai lebih efektif	2	3	6	Sedang	Koordinasi dengan bidang balai/balai terkait kesesuaian rencana program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang ada	Sekretaris Dinas PUPESDM DIY	Januari - Maret 2025
		5	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Terlaksananya Publikasi Program/kegiatan SKPD melalui surat kabar)	1	Keterlambatan pelaksanaan publikasi melalui surat kabar	Terjadi karena belum adanya progres pekerjaan fisik di lapangan	C	Informasi yang tersampaikan terlambat	Koordinasi dengan stakholder lebih intensif	2	3	6	Sedang	Koordinasi dengan stakholder	Sekretaris Dinas PUPESDM DIY	April- Desember 2025

			6	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Terlaksananya Publikasi Program/kegiatan SKPD melalui Program Televisi Talkshow)	1	Keterlambatan pelaksanaan Talkshow melalui Televisi	Terjadi karena belum adanya Narasumber yang sesuai	C	Progres pekerjaan terlambat	Koordinasi dengan Narasumber dan Bidang/Balai	2	3	6	Sedang	Koordinasi dengan Narasumber dan Bidang/Balai	Sekretaris Dinas PUPESDM DIY	Agustus-September & Oktober 2025		
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	1	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak terpenuhi secara lengkap	Perubahan anggaran karena kondisi tertentu	C	Tidak semua Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terpenuhi sehingga menghambat kinerja	1. Koordinasi dengan Kelompok Substansi Program	2	3	6	Sedang	1. Koordinasi dengan Kelompok Substansi Program	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember
							2	Keterlambatan pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Perencanaan angka kurang matang 2. Keterlambatan administrasi	C	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terlambat	1. Perencanaan angka lebih matang 2. Koordinasi dengan Subbagian Keuangan dan Penyedia Jasa	2	3	6	Sedang	1. Perencanaan angka lebih matang 2. Koordinasi dengan Subbagian Keuangan dan Penyedia Jasa	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember
		2	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor)	1	Peralatan dan perlengkapan kantor belum seluruhnya terpenuhi.	1. Perubahan anggaran karena kondisi tertentu 2. Perencanaan angka kurang matang 3. Keterlambatan administrasi	C	Menghambat kinerja dan kelancaran tugas dan fungsi OPD	1. Koordinasi dengan Kelompok Substansi Program 2. Perencanaan dan penjadwalan angka lebih matang dalam memprioritaskan kebutuhan	1	1	1	Rendah	1. Koordinasi dengan bidang terkait kebutuhan dan penggunaan peralatan gedung kantor 2. Monev secara berkala	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember
							2	Belum meratanya distribusi peralatan kantor	1. Keterbatasan stok peralatan dan perlengkapan kantor 2. Kurangnya koordinasi dengan bidang/balai terkait kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	C	Menghambat kinerja dan kelancaran tugas dan fungsi OPD	1. Pengecekan stok opname secara berkala 2. Koordinasi dengan bidang balai terkait inventarisasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	3	2	6	Sedang	1. Pengecekan stok opname secara berkala 2. Koordinasi dengan bidang balai terkait inventarisasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyusunan SOP	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember
		3	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga)	1	Kebutuhan peralatan rumah tangga tidak terpenuhi secara lengkap	1. Perubahan anggaran karena kondisi tertentu 2. Perencanaan angka kurang matang 3. Keterlambatan administrasi	C	Tidak optimalnya kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas pada kondisi tertentu	1. Perencanaan angka lebih matang 2. Koordinasi dengan Subbagian Keuangan dan Penyedia Jasa	1	2	2	Rendah	1. Penyusunan rencana kebutuhan dengan bidang/balai 2. Penyusunan rencana koordinasi secara berkala dengan bidang/balai	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember
							2	Belum meratanya distribusi peralatan rumah tangga	1. Keterbatasan stok peralatan rumah tangga 2. Kurangnya koordinasi dengan bidang/balai terkait kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	C	Tidak optimalnya kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas pada kondisi tertentu	1. Koordinasi dengan bidang/balai terkait kebutuhan peralatan rumah tangga	1	2	2	Rendah	1. Koordinasi dengan bidang/balai terkait kebutuhan peralatan rumah tangga 2. Monev secara berkala	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember
		4	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Tersedianya barang cetak dan penggandaan)	1	Barang cetak dan penggandaan belum seluruhnya terpenuhi.	1. Perubahan anggaran karena kondisi tertentu 2. Perencanaan angka kurang matang 3. Keterlambatan administrasi	C	Menghambat kinerja dan kelancaran tugas dan fungsi OPD	1. Koordinasi kebutuhan 2. Perencanaan angka lebih matang	2	3	6	Sedang	1. Koordinasi dengan bidang terkait kebutuhan barang cetak dan penggandaan 2. Monev secara berkala	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember
		5	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Tersedianya surat kabar/majalah)	1	Surat Kabar/Majalah tidak terbaca	Keterlambatan Pengantaran Surat Kabar/Majalah	C	Sumber informasi/ berita terbaru yang terlewatkan oleh pegawai	Kontrol dan komunikasi dengan penyedia surat kabar/majalah agar selalu tepat waktu	1	1	1	Rendah	Kontrol dan komunikasi dengan penyedia surat kabar/majalah agar selalu tepat waktu	Kepala Subbagian Umum	Februari - Desember
		6	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Konsultasi dan koordinasi Dinas PUP ESDM DIY dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun)	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi/ koordinasi dalam dan luar daerah tidak terlaksana dengan baik	1. Kurangnya koordinasi antar bidang terkait kebutuhan rapat-rapat, koordinasi dalam dan ke luar daerah 2. Anggaran yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah	C	Menghambat kelancaran tugas dan fungsi OPD	1. Koordinasi dengan bidang-bidang terkait kebutuhan dan jadwal pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dalam dan ke luar daerah 2. Koordinasi dengan Kelompok Substansi Program	2	5	10	Tinggi	1. Koordinasi dengan bidang terkait kebutuhan dan jadwal pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dalam dan ke luar daerah 2. Koordinasi dengan Kelompok Substansi Program	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember

				2	Tidak semua undangan koordinasi/konsultasi dapat dihadiri	1. Banyaknya undangan dari instansi vertikal yang masuk ke OPD 2. Terbatasnya anggaran karena kondisi tertentu	C	Informasi dari undangan yang tidak bisa dihadiri tidak tersampaikan dan tidak bisa ditindaklanjuti	1. Komunikasi dengan pihak pengundang 2. Koordinasi dengan Kelompok Substansi Program	2	5	10	Tinggi	1. Komunikasi dengan pihak pengundang 2. Koordinasi dengan Kelompok Substansi Program	Kepala Subbagian Umum	Februari - Desember		
			2	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Tersediannya makan dan minum rapat sesuai kebutuhan selama 1 tahun)	1	Makan dan minum rapat tidak tercukupi untuk 1 tahun	C	Pelayanan rapat tidak optimal	Pencermatan kebutuhan pelaksanaan makan dan minum rapat selama 1 tahun	2	4	8	Sedang	Koordinasi serta Pencermatan dan Penjadwalan kebutuhan pelaksanaan rapat selama 1 tahun	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember		
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Tersediannya peralatan dan mesin lainnya untuk penunjang kebutuhan kantor)	1	Pengadaan terlambat	1. Perencanaan kurang matang 2. Kurangnya koordinasi antara pengguna dan penyedia barang	C	Peralatan dan Mesin lainnya tidak dapat digunakan pada waktu yang telah direncanakan	1. Perencanaan angka lebih matang 2. Koordinasi dengan Penyedia Barang	2	2	4	Rendah	1. Perencanaan angka lebih matang 2. Koordinasi dengan Penyedia Barang	Kepala Subbagian Umum	April - Desember
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Tersediannya kebutuhan jasa surat menyurat)	1	Kebutuhan Jasa Surat menyurat tidak tercukupi	Kebutuhan meterai/perangko mendadak yang tidak bisa diprediksi	C	Pekerjaan surat menyurat/pekerjaan lain yang menggunakan meterai dan perangko sebagian tidak terlaksana	Pencermatan kebutuhan agar bisa tercukupi	1	2	2	Rendah	Pencermatan kebutuhan agar bisa tercukupi	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Tersediannya jasa komunikasi, listrik, air selama 1 tahun)	1	Pemadaman listrik, pemadaman jaringan telepon, dan kran air mati	1. Keterlambatan pembayaran tagihan 2. Pemadaman listrik secara bergilir/perbaikan jaringan listrik/telpon/air	C	Menghambat kinerja dikarenakan pemadaman listrik/air serta pelayanan tamu secara langsung maupun melalui telepon tidak optimal	1. Penjadwalan pembayaran tagihan listrik, telepon dan air agar tidak terlambat 2. Koordinasi dengan Subbag Keuangan 3. Koordinasi dengan PLN, Telkom dan PDAM	2	5	10	Tinggi	1. Penjadwalan pembayaran tagihan listrik, telepon dan air agar tidak terlambat 2. Koordinasi dengan Subbag Keuangan 3. Koordinasi dengan PLN, Telkom dan PDAM	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor)	1	Keamanan dan Ketertiban Kantor kurang optimal	Kewaspadaan dan patroli tenaga keamanan tidak berjalan dengan baik	C	1. Terjadi pencurian/Kehilangan barang di lingkungan kantor 2. Area Parkir tidak tertata rapi 3. Kemacetan di depan kantor karena tidak ada pengaturan lalu lintas	1. Kontrol terhadap SOP Tenaga Keamanan yang ada 2. Koordinasi dengan Koordinator Lapangan Petugas Keamanan	2	5	10	Tinggi	1. Koordinasi rutin pelaksanaan SOP Tenaga Keamanan 2. Move berkala dengan penyedia jasa keamanan	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember
				2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Tersediannya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun)	1	Kebersihan Lingkungan Kantor tidak optimal	1. Bahan/Alat pembersih kurang sesuai 2. Tenaga kebersihan kurang optimal kerjanya	C	Lingkungan kantor kurang bersih (tidak memenuhi K5 - Kenyamanan, Keamanan, Keindahan, Kebersihan dan Kerapian)	1. Mengontrol penggunaan alat dan bahan kebersihan yang tepat 2. Meminta Penyedia Jasa Kebersihan untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kebersihan ybs	2	5	10	Tinggi	1. Memantau dan mengevaluasi penggunaan alat dan bahan kebersihan 2. Pelatihan rutin kepada petugas/tenaga kebersihan	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember
				3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Tersediannya jasa laundry selama 1 tahun)	1	Jasa laundry tidak optimal kebersihannya	Jasa laundry yang dipilih kurang bersih, tidak tepat waktu, dan kurang bertanggung jawab	C	1. Pelayanan pada mess PU Kaliurang tidak optimal 2. Kehilangan barang yang dilaundry	1. Pemilihan jasa laundry yang tepat agar selalu bersih, tepat waktu dan tidak ada kehilangan perlengkapan 2. Koordinasi dengan petugas Wisma PI	2	3	6	Sedang	1. Pemilihan jasa laundry yang tepat agar selalu bersih, tepat waktu dan tidak ada kehilangan perlengkapan 2. Koordinasi dengan petugas Wisma PI	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember
				4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Terpenuhinya penataan arsip selama 1 tahun)	1	Penataan Arsip tidak optimal	Keterlambatan penataan arsip sehingga arsip menumpuk berlebih	C	Tempat arsip penuh, Dokumen-dokumen tidak tertata rapi	Kontrol rutin terhadap jasa penataan arsip, penjadwalan pemusnahan arsip lama yang sudah tidak digunakan	2	5	10	Tinggi	Kontrol rutin terhadap jasa penataan arsip, penjadwalan pemusnahan arsip lama yang sudah tidak digunakan	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember
				5	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Pajak sampah dan retribusi sampah selama 1 tahun)	1	Keterlambatan pembayaran pajak dan retribusi sampah	Penjadwalan pembayaran pajak dan retribusi kurang cermat	C	Keterlambatan administrasi	Koordinasi internal	2	2	4	Rendah	Koordinasi internal	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember

			6	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Terpenuhinya retribusi pajak daerah)	Keterlambatan pembayaran pajak dan retribusi pajak daerah	Kurang cermatnya penjadwalan pembayaran retribusi pajak daerah	C	Keterlambatan administrasi dan denda keterlambatan	Koordinasi internal	2	3	6	Sedang	Koordinasi internal	Kepala Subbagian Umum	Februari - Desember				
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Terpenuhinya pembayaran pajak dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD)	1	Pajak kendaraan tidak dibayarkan/terlambat dibayarkan	Kelalaian pemegang kendaraan	C	Denda keterlambatan	1. Penjadwalan pembayaran pajak kendaraan agar selalu tepat waktu 2. Koordinasi internal	4	4	16	Tinggi	1. Penjadwalan pembayaran pajak kendaraan agar selalu tepat waktu 2. Koordinasi internal	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember	
				2	Kendaraan dinas tidak terpelihara secara optimal	Kurang tertibnya pemegang kendaraan dalam pemeliharaan kendaraan	C	Kendaraan dinas rusak/tidak terpelihara dengan baik sehingga menghambat kinerja	1. Koordinasi internal 2. Pemantauan secara berkala serta berkoordinasi dengan bidang ybs	4	4	16	Tinggi	1. Koordinasi internal 2. Pemantauan secara berkala serta berkoordinasi dengan bidang ybs	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember				
		2	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya selama 1 tahun)	1	Belum optimalnya pemeliharaan dan mesin lainnya	1. Keterlambatan Pemeliharaan 2. Kurangnya koordinasi dengan bidang terkait peralatankantor dan mesin yang sudah waktunya dilakukan pemeliharaan	C	1. Peralatan kantor dan alat berat mati / umur peralatan kantor dan alat berat menurun 2. Menghambat kinerja	Koordinasi dan penjadwalan agar pemeliharaan peralatan kantor dan alat berat tidak terlambat	4	4	16	Tinggi	1. Koordinasi dan penjadwalan agar pemeliharaan tidak terlambat 2. Monev secara berkala	Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember	
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Terpeliharanya dan terlaksananya rehabilitasi bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya selama 1 tahun)	1	Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1. Kondisi kerusakan gedung yang tidak bisa diprediksi 2. Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan/rehabilitasi	C	1. Kerusakan bangunan, kenyamanan bekerja berkurang 2. Menghambat kinerja dan pelaksanaan tugas OPD	1. Koordinasi dengan bidang-bidang terkait kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi bagian bagian gedung dan lingkungan kantor 2. Koordinasi dengan kelompok Substansi Program	4	4	16	Tinggi	1. Koordinasi dengan bidang terkait kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi bagian bagian gedung dan lingkungan kantor 2. Koordinasi dengan kelompok Substansi Program	Kepala Subbagian Umum	Februari - Desember
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	Keterlambatan gaji/kenaikan/penurunan pangkat/gaji berkala yang di terima ASN	- Keterlambatan SK Pensiun dan kenaikan pangkat dari BKD - Keterlambatan pengumpulan data kelengkapan tunjangan keluarga (KP4)	C	Mempengaruhi jumlah gaji yang seharusnya sudah diterima oleh ASN	1. SOP 2. Koordinasi eksternal 3. Sosialisasi internal	3	3	9	Sedang	1. Koordinasi pelaksanaan SOP 2. Koordinasi Eksternal Pengelola Gaji dengan BKD 3. Sosialisasi tentang pengumpulan data kelengkapan tunjangan keluarga	Kepala Sub Bagian Keuangan	12 bulan (Proses penggajian setiap bulannya dari bulan januari s.d Desember)	
				2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Keterlambatan tersedianya dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keterlambatan cairnya uang panjar	C	Keterlambatan honorarium pengelola keuangan	1. SOP 2. Koordinasi internal	2	3	6	Sedang	1. Koordinasi pelaksanaan SOP 2. Koordinasi internal pemanjar dan pengelola keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan	12 bulan (Proses dilakukan setiap bulannya dari bulan januari s.d Desember)
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (Tersusunnya Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran sebanyak 1 laporan)	1	Keterlambatan penyusunan Laporan Aset dan Laporan Persediaan semesteran	Keterlambatan data aset dan persediaan dari bidang/ Balai	C	Keterlambatan penyampaian laporan aset dan laporan persediaan	1. SOP 2. Memaksimalkan penggunaan aplikasi 3. Koordinasi internal 4. Koordinasi Eksternal dengan BPKA	3	3	9	Sedang	1. Koordinasi internal dengan pengurus barang 2. Bimbingan Teknis/ Pelatihan Pengurus Barang	Kepala Sub Bagian Keuangan	12 bulan (Proses pelaporan setiap 6 bulan sekali)

			3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Tersusunnya Laporan Keuangan Tahunan Gabungan sebanyak 1 laporan)	1	Keterlambatan penyusunan dan penyelesaian Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1. Keterlambatan data pendukung (aset dan pengurus barang) 2. Keterlambatan laporan dari bidang/ Balai 3. Validasi data pada aplikasi SIPD	C	Keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke BPKA dan Inspektorat	1. SOP 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal dengan BPKA 4. Memaksimalkan penggunaan aplikasi	3	3	9	Sedang	1. Koordinasi pelaksanaan SOP 2. Koordinasi internal dengan penanggung jawab kegiatan 3. Bimbingan teknis Pengelola Akuntansi	Kepala Sub Bagian Keuangan	12 bulan (Proses pembuatan laporan di akhir tahun s.d awal tahun berikutnya)
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Keterlambatan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	C	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD selesai tidak tepat waktu	1. SOP 2. Koordinasi internal	2	3	6	Sedang	1. Koordinasi pelaksanaan SOP 2. Koordinasi internal pemanjar dan pengurus barang	Kepala Sub Bagian Keuangan	12 bulan (Proses dilakukan setiap bulannya dari bulan Januari s.d Desember)
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD)	1	Keterlambatan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	C	Keterlambatan honorarium pengurus barang	1. SOP 2. Koordinasi internal	2	3	6	Sedang	1. Koordinasi pelaksanaan SOP 2. Koordinasi internal pemanjar dan pengurus barang	Kepala Sub Bagian Keuangan	12 bulan (Proses dilakukan setiap bulannya dari bulan Januari s.d Desember)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																	
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara = 25 unit	1	Belum semua embung terpelihara (babat semak)	C	Kerusakan pada pemasangan batu disebabkan karena pelapukan akibat ditumbuhi tanaman	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara tepat, tepat, akurat dan detail	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember
						2	Masih terjadi sedimentasi di embung	C	Debit air berkurang	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara tepat, tepat, akurat dan detail	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember
						3	embung yang dibersihkan ditumbuhi rumput lagi dan terdapat sedimen lagi	C	Pendangkalan embung dan banyak semak	Dilakukan prioritas pelaksanaan pemeliharaan	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember
						4	Harga berubah sewaktu-waktu	C	Pekerjaan tidak sesuai target	Adanya rencana penganggaran hingga tercapai target	3	3	9	Sedang	- Adanya rencana penganggaran hingga tercapai target serta monev yang ketat - dilakukan evaluasi harga sebelum proses penandaan	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
						5	Kesiapan administrasi penyedia jasa tidak tepat waktu	C	Terlambatnya tanda tangan kontrak	Dilakukan teguran secara lisan maupun tertulis	2	3	6	Sedang	a. Dilakukan teguran secara lisan maupun tertulis, b. dilakukan koordinasi secara instens	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
		2	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi = 2 dokumen	1	Data SDA tidak konsisten	C	Terjadi kesalahan dalam input data	Melaksanakan diskusi dengan masing-masing korwil dan tenaga ahli untuk koreksi data	3	3	9	Sedang	Penentuan standar data yang dibutuhkan untuk setiap parameter pengukuran	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
						2	Belum semua alat di pos hidrologi terpelihara	C	Kurangnya akurasi data yang dihasilkan	Cek lapangan	3	3	9	Sedang	Peningkatan pemeliharaan berkala	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
						1	Sarana dan Prasarana Rapat / Pertemuan tidak memadai	C	Mengganggu proses berjalannya rapat / pertemuan	Memastikan sarana dan prasarana tersedia memadai	1	1	1	Rendah	Melakukan pengecekan sarana dan prasarana sebelum pelaksanaan kegiatan	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
		3	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	1	Sarana dan Prasarana Rapat / Pertemuan tidak memadai	C	Penyampaian materi Rapat kurang maksimal	Koordinasi dengan Narasumber sebelum pelaksanaan	1	1	1	Rendah	Melaksanakan diskusi dengan Narasumber untuk menyamakan pemahaman berkaitan tema Acara	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025

					3	Tingkat kehadiran peserta rendah	Pelaksanaan pertemuan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat	C	Penyusunan hasil rekomendasi kurang maksimal	Penyampaian rencana rapat jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan	1	1	1	Rendah	Melakukan koordinasi dengan ketua kelompok dan tokoh masyarakat untuk penentuan jadwal pertemuan	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
		4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1	Alokasi pemberian rekomtek terganggu	C	Tertundanya pemberian rekomtek	Pemberikan persyaratan pengajuan rekomtek	1	1	1	Rendah	Sosialisasi Kebijakan / SOP	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
					2	Pemohon tidak tahu SOP dan Prosedur permohonan Rekomtek	Pelaksanaan SOP yang tidak sesuai oleh Pemohon	C	Pemohon tidak melaksanakan proses yang telah ditentukan	publikasi tahapan proses permohonan rekomtek	1	1	1	Rendah	Monitoring Kebijakan / SOP	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1	Pelelangan gagal	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku; b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang SDAD	April 2025
					2	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan hasil monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang SDAD	April s.d. September 2025
					3	Potensi kecelakaan kerja;	Penggunaan alat berat	C	Luka ringan s.d. berat pada pekerja dan masyarakat;	Pelaksanaan prosedur kerja yang benar sesuai dengan SOP;	4	3	12	Tinggi	Pengawasan K3 pelaksanaan konstruksi	PPTK Bidang SDAD	April s.d. September 2025
					4	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat.	Tidak ada manajemen lalu lintas, pelaksanaan pekerjaan saat musim kemarau, penggunaan peralatan bisung;	C	Kemacetan lalu lintas di permukiman; Peningkatan polusi debu dan kebisingan;	Pengaturan lalu lintas dengan rambu; Penyiraman rutin pada jalan dan lokasi kerja;	4	3	12	Tinggi	a. Pertemuan berkala dengan masyarakat/menggunakan teleconference maupun langsung;	PPTK Bidang SDAD	April s.d. September 2025
					5	Terkena racun binatang	Adanya binatang yang berbahaya (berbisa/beracun) muncul saat pembersihan lahan untuk persiapan pekerjaan	C	Terjadi luka ringan s.d. Serious	Memberi bekal yang memadai pada pekerja dan mempersiapkan P3K	4	3	12	Tinggi	Memberi bekal yang memadai pada pekerja dan mempersiapkan P3K	PPTK Bidang SDAD	April s.d. September 2025
					6	Harga berubah sewaktu-waktu	Perencanaan kurang matang dalam menentukan nilai kebutuhan	C	Pekerjaan tidak sesuai target	adanya rencana penganggaran hingga tercapai target	3	3	9	Sedang	a. Adanya rencana penganggaran hingga tercapai target serta movev yang ketat , b. dilakukan evaluasi harga sebelum proses pengadaan	PPTK Bidang SDAD	April s.d. September 2025
					7	Kesiapan administrasi penyedia jasa tidak tepat waktu	Penerbitan Jaminan pelaksanaan terikat oleh regulasi Bnak penjamin	C	Terlambatnya tanda tangan kontrak	Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis	3	3	9	Sedang	Pengecekan antara penyedia jasa konsultan dan kontraktor	PPTK Bidang SDAD	April s.d. September 2025
					8	Pelaksanaan pekerjaan mundur dari jadwal	Butuh waktu dan kecermatan dalam mencocokkan volume lapangan dengan volume kontrak awal	C	Terlambatnya pelaksanaan kontrak	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara bersama untuk review desain kemudian dituangkan dalam RMK dan Addendum kontrak	3	3	9	Sedang	Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis	PPTK Bidang SDAD	April s.d. September 2025
					9	Kurangnya pengawasan dari petugas pengawas	Kurangnya pengetahuan dan pengalaman (SDM) dalam hal pengawasan lapangan	C	kemungkinan terjadi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek dan ukuran	pelatihan kepada pengawas lapangan	3	3	9	Sedang	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara bersama untuk review desain kemudian dituangkan dalam RMK dan Addendum (bila perlu)	PPTK Bidang SDAD	April s.d. September 2025
					10	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksanaan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	3	3	9	Sedang	a. Pelatihan kepada pengawas lapangan b. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan c. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang SDAD	April s.d. September 2025

	2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Petugas OP bekerja secara harian	Tugas fungsi petugas		Kurang optimalnya operasi jaringan irigasi	Pembagian jadwal sesuai Hari Orang kerja (HOK) selama maksimal 22 hari per bulan untuk 8 jam perhari	3	3	9	Sedang	Pembuatan jadwal secara shift untuk 24 jam	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
					2	Belum semua jaringan irigasi terpelihara (babat semak)	Ketidak cermatan dalam melaksanakan survey lapangan	C	kerusakan pada pemasangan batu disebabkan karena pelapukan akibat ditumbuhi tanaman	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara tepat, tepat, akurat dan detail	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada juru dan pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
					3	Masih terjadi sedimentasi di saluran irigasi	Dana yang terbatas	C	Debit air berkurang	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara tepat, tepat, akurat dan detail	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada juru dan pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
					4	Irigasi yang dibersihkan ditumbuhi rumput lagi dan terdapat sedimen lagi	Pemeliharaan berkala dilakukan dengan jarak waktu lama	C	Pendangkalan saluran irigasi dan jaringan irigasi banyak semak	Dilakukan prioritas pelaksanaan pemeliharaan	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada juru dan pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
	3	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	1	Petugas OP bekerja secara harian	Tugas fungsi petugas		Kurang optimalnya operasi bendung irigasi	Pembagian jadwal sesuai Hari Orang kerja (HOK) selama maksimal 22 hari per bulan untuk 8 jam perhari	3	3	9	Sedang	Pembuatan jadwal secara shift untuk 24 jam	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
					2	Belum semua bendung terpelihara (babat semak)	Ketidak cermatan dalam melaksanakan survey lapangan	C	kerusakan pada pemasangan batu disebabkan karena pelapukan akibat ditumbuhi tanaman	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara tepat, tepat, akurat dan detail	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada juru dan pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
					3	Masih terjadi sedimentasi di bendung	Dana yang terbatas	C	Debit air berkurang	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara tepat, tepat, akurat dan detail	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada juru dan pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
					4	bendung yang dibersihkan ditumbuhi rumput lagi dan terdapat sedimen lagi	Pemeliharaan berkala dilakukan dengan jarak waktu lama	C	Pendangkalan bendung dan banyak semak	Dilakukan prioritas pelaksanaan pemeliharaan	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada juru dan pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
	4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	1	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	1	kegiatan tata pengaturan air mundur	Mundurinya rapat koordinasi	C	Jadwal tata tanam mundur	Koordinasi secara berkala	3	3	9	Sedang	melibatkan P3A/GP3A dalam proses penyusunan rekomendasi	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
	5	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1	Output pekerjaan tidak sesuai dengan target, sehingga Evaluasi dan Perencanaan Sistem Irigasi di tahun selanjutnya terhambat	Terdapat kesalahan oleh Pihak/Stakeholders yang memberikan data-data, baik kinerja fisik, nonfisik	C	Tidak memenuhi target yang direncanakan	1. Memberikan pendampingan dalam hal koordinasi antar stakeholders secara intensif 2. Crosscek data dengan beberapa sampel data di lapangan maupun antar stakeholder	3	3	9	Sedang	Melibatkan Petugas OP, P3A/GP3A/ IP3A, dan cross cek data antara lapangan dengan sampel data yang ada	PPTK Bidang SDAD	Februari - November 2025
					2	Data tidak sesuai dengan keadaan di lapangan	Petugas melakukan kesalahan dalam menginput data lapangan (Kompetensi SDM Rendah (Man), komputer mengalami kerusakan (Machine))	C	Kualitas output dokumen menurun	Pengecekan ulang oleh bidang langsung di lapangan	2	3	6	Sedang	Manajerial yang optimal dengan pengecekan langsung	PPTK Bidang SDAD	Februari - November 2025

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																		
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1	Potensi penurunan kesehatan pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan.	Bertemu dengan banyak orang di lokasi pelaksanaan yang berada di tepi jalan raya (mobilitas pengguna jalan), atau penggunaan peralatan secara bersama-sama.	UC	Kemungkinan penularan penyakit melalui kontak maupun udara.	1. Pengadaan peralatan kesehatan kerja; 2. Pemakaian alat pelindung kesehatan pada setiap pekerja; 3. Pelaksanaan protokol kesehatan 3 M.	2	2	4	Rendah	1. Melaksanakan pemantauan pengenalan alat pelindung Diri; 2. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan kontak langsung selama tahap pelaksanaan.	PPTK Bidang SDAD	Januari-Desember 2025
						2	Peralatan yang digunakan mengalami kerusakan/tidak dapat digunakan.	Tidak dilakukan pemeriksaan peralatan pekerjaan pemeliharaan.	C	1. Pekerjaan gali waled terhenti; 2. Aliran dalam saluran drainase tidak lancar; 3. Genangan masih dapat terjadi.	1. Melaksanakan pemeriksaan awal pada peralatan yang akan digunakan; 2. Menggunakan peralatan sesuai penggunaannya.	3	3	9	Sedang	1. Melaksanakan pemeriksaan peralatan secara berkala; 2. Menyiapkan cadangan peralatan.	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
						3	Kecelakaan kerja pada penggunaan peralatan.	1. Tidak dilakukan standar penggunaan peralatan dengan benar; 2. Tidak mengenakan alat pelindung diri.	C	1. Pekerja mengalami kecelakaan kerja; 2. Pekerjaan terhenti dan terlambat.	1. Pengadaan peralatan keselamatan kerja; 2. Pemakaian alat keselamatan kerja pada setiap pekerja; 3. Pelaksanaan prosedur penggunaan peralatan dengan benar.	3	3	9	Sedang	1. Melaksanakan pemantauan pengenalan alat keselamatan kerja; 2. Melaksanakan pemantauan prosedur penggunaan peralatan dengan benar selama tahap pelaksanaan; 3. Menyiapkan alat dan bahan P3K di lokasi kerja. Penerapan Prosedur K3	PPTK Bidang SDAD	Januari s.d. Desember 2025
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																		
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1	Rehabilitasi Jalan	1	Panjang jalan yang direhabilitasi 3,975Km	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	Januari - April 2025
						2	Peserta terlambat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan	Petugas tidak memberikan informasi tanggal masa jaminan pelaksanaan dengan jelas (Kompetensi SDM Rendah)	C	Jadwal kontrak mundur dan mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan	Pemberian informasi yang tepat kepada penyedia jasa	3	3	9	Sedang	a. Pemberian informasi yang tepat, jelas dan dokumentasi kepada penyedia jasa. b. Dilakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan penyedia jasa	PPTK Bidang Bina Marga	Januari - April 2025
						3	Tidak semua warga sekitar mengetahui adanya pekerjaan di lokasi	Kurangnya sosialisasi mengenai undangan sosialisasi	C	Kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	Melakukan sosialisasi ke semua warga di sekitar lokasi pekerjaan	2	4	8	Sedang	a. Sosialisasi awal kepada masyarakat, b. Dilakukan koordinasi penentuan jadwal sosialisasi kepada ketua Kelompok masyarakat	PPTK Bidang Bina Marga	Januari - April 2025
						4	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat	Tidak ada manajemen lalu lintas, pelaksanaan pekerjaan saat musim kemarau, penggunaan peralatan bising	C	Kemacetan lalu lintas di permukiman; Peningkatan polusi debu dan kebisingan	Pengaturan lalu lintas dengan rambu; Penyiraman rutin pada lokasi pekerjaan	3	3	9	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Januari - April 2025
						5	Perubahan Volume Pekerjaan pada pelaksanaan kegiatan	Terjadi perubahan rencana pekerjaan	C	Terlambatnya pelaksanaan penyiapan pekerjaan	Pengumpulan data awal pekerjaan (MC 0) secara lengkap	3	3	9	Sedang	Segera melakukan koordinasi apabila terjadi perubahan volume item pekerjaan	PPTK Bidang Bina Marga	Januari - April 2025
						6	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Januari - April 2025
						7	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Januari - April 2025
						2	Panjang Jalan yang Direhabilitasi = 0,65 Km (Rehabilitasi Jalan Ruas Klangan - Tempel)	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis

4	Panjang Jalan yang Direhabilitasi = 2,0 Km (Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta - Pulowatu)	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	Juli - Desember 2025		
		2	Peserta terlambat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan	Petugas tidak memberikan informasi tanggal masa jaminan pelaksanaan dengan jelas (Kompetensi SDM Rendah)	C	Jadwal kontrak mundur dan mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan	Pemberian informasi yang tepat kepada penyedia jasa	3	3	9	Sedang	a. Pemberian informasi yang tepat, jelas dan dokumentasi kepada penyedia jasa, b. Dilakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif	PPTK Bidang Bina Marga	Juli - Desember 2025		
		3	Tidak semua warga sekitar mengetahui adanya pekerjaan di lokasi	Kurangnya sosialisasi mengenai undangan sosialisasi	C	Kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	Melakukan sosialisasi ke semua warga di sekitar lokasi pekerjaan	2	4	8	Sedang	a. Sosialisasi awal kepada masyarakat, b. Dilakukan koordinasi penentuan jadwal sosialisasi kepada ketua Kelompok masyarakat	PPTK Bidang Bina Marga	Juli - Desember 2025		
		4	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat	Tidak ada manajemen lalu lintas, pelaksanaan pekerjaan saat musim kemarau, penggunaan peralatan bising	C	Kemacetan lalu lintas di permukiman; Peningkatan polusi debu dan kebisingan	Pengaturan lalu lintas dengan rambu; Penyiraman rutin pada lokasi pekerjaan	3	3	9	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Juli - Desember 2025		
		5	Perubahan Volume Pekerjaan pada pelaksanaan kegiatan	Terjadi perubahan rencana pekerjaan	C	Terlambatnya pelaksanaan penyiapan pekerjaan	Pengumpulan data awal pekerjaan (MC 0) secara lengkap	3	3	9	Sedang	Segera melakukan koordinasi apabila terjadi perubahan volume item pekerjaan	PPTK Bidang Bina Marga	Juli - Desember 2025		
		6	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Juli - Desember 2025		
		7	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Juli - Desember 2025		
2	Rekonstruksi Jalan	1	Panjang Jalan yang Direkonstruksi = 2,0 Km (Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot)	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	April - November 2025
				2	Tidak semua warga sekitar mengetahui adanya pekerjaan di lokasi	Kurangnya sosialisasi mengenai undangan sosialisasi	C	Kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	Melakukan sosialisasi ke semua warga di sekitar lokasi pekerjaan	2	4	8	Sedang	a. Sosialisasi awal kepada masyarakat, b. Dilakukan koordinasi penentuan jadwal sosialisasi kepada ketua Kelompok masyarakat	PPTK Bidang Bina Marga	April - November 2025
				3	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat	Tidak ada manajemen lalu lintas, pelaksanaan pekerjaan saat musim kemarau, penggunaan peralatan bising	C	Kemacetan lalu lintas di permukiman; Peningkatan polusi debu dan kebisingan	Pengaturan lalu lintas dengan rambu; Penyiraman rutin pada lokasi pekerjaan	3	3	9	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	April - November 2025
				4	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Bina Marga	April - November 2025
				5	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	April - November 2025

1	Panjang Jalan yang Direkonstruksi = 4,5 Km (Peningkatan Jalan Ruas Demakijo - Kebonagung I)	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	April - November 2025
		2	Peserta terlambat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan	Petugas tidak memberikan informasi tanggal masa jaminan pelaksanaan dengan jelas (Kompetensi SDM Rendah)	C	Jadwal kontrak mundur dan mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan	Pemberian informasi yang tepat kepada penyedia jasa	3	3	9	Sedang	a. Pemberian informasi yang tepat, jelas dan dokumentasi kepada penyedia jasa, b. Dilakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif	PPTK Bidang Bina Marga	April - November 2025
		3	Tidak semua warga sekitar mengetahui adanya pekerjaan di lokasi	Kurangnya sosialisasi mengenai undangan sosialisasi	C	Kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	Melakukan sosialisasi ke semua warga di sekitar lokasi pekerjaan	2	4	8	Sedang	a. Sosialisasi awal kepada masyarakat, b. Dilakukan koordinasi penentuan jadwal sosialisasi kepada ketua Kelompok masyarakat	PPTK Bidang Bina Marga	April - November 2025
		4	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat	Tidak ada manajemen lalu lintas, pelaksanaan pekerjaan saat musim kemarau, penggunaan peralatan bising	C	Kemacetan lalu lintas di permukiman; Peningkatan polusi debu dan kebisingan	Pengaturan lalu lintas dengan rambu; Penyiraman rutin pada lokasi pekerjaan	3	3	9	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	April - November 2025
		5	Perubahan Volume Pekerjaan pada pelaksanaan kegiatan	Terjadi perubahan rencana pekerjaan	C	Terlambatnya pelaksanaan penyiapan pekerjaan	Pengumpulan data awal pekerjaan (MC 0) secara lengkap	3	3	9	Sedang	Segera melakukan koordinasi apabila terjadi perubahan volume item pekerjaan	PPTK Bidang Bina Marga	April - November 2025
		6	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Bina Marga	April - November 2025
		7	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	April - November 2025

3	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun :	2	Data tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Petugas melakukan kesalahan dalam menginput data lapangan (Kompetensi SDM Rendah (Man), komputer mengalami kerusakan (Machine))	C	Target kegiatan tidak terpenuhi	Pengecekan ulang oleh bidang	2	4	8	Sedang	Manajerial yang optimal	PPTK Bidang Bina Marga	Februari - Desember 2025		
				2	DED Ruas Jalan Yogyakarta - Pulowatu	1	Output pekerjaan tidak sesuai dengan target	Penyedia jasa kurang tanggap dalam menyelesaikan kekurangan pekerjaan	C	Tidak memenuhi target yang direncanakan	Memberikan pendampingan dalam hal koordinasi secara intensif	2	3	6	Sedang	Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	April - Juli 2025
						2	Data tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Petugas melakukan kesalahan dalam menginput data lapangan (Kompetensi SDM Rendah (Man), komputer mengalami kerusakan (Machine))	C	Target kegiatan tidak terpenuhi	Pengecekan ulang oleh bidang	2	4	8	Sedang	Manajerial yang optimal	PPTK Bidang Bina Marga	April - Juli 2025
		3	Pekerjaan terlambat diserahkan			Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari intansi terkait	3	3	9	Sedang	Diterbitkan surat peringatan pertama, kedua, ketiga dan dilaksanakan Show Cause Meeting (SCM)	PPTK Bidang Bina Marga	April - Juli 2025		
		3	Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Yogyakarta - Pulowatu	1	Output pekerjaan tidak sesuai dengan target	Penyedia jasa kurang tanggap dalam menyelesaikan kekurangan pekerjaan	C	Tidak memenuhi target yang direncanakan	Memberikan pendampingan dalam hal koordinasi secara intensif	2	3	6	Sedang	Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Juli - Oktober 2025		
				2	Data tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Petugas melakukan kesalahan dalam menginput data lapangan (Kompetensi SDM Rendah (Man), komputer mengalami kerusakan (Machine))	C	Target kegiatan tidak terpenuhi	Pengecekan ulang oleh bidang	2	4	8	Sedang	Manajerial yang optimal	PPTK Bidang Bina Marga	Juli - Oktober 2025		
	3			Pekerjaan terlambat diserahkan	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari intansi terkait	3	3	9	Sedang	Diterbitkan surat peringatan pertama, kedua, ketiga dan dilaksanakan Show Cause Meeting (SCM)	PPTK Bidang Bina Marga	Juli - Oktober 2025			
	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvei kondisinya = 674,58 Km	1	Seleksi gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan sesuai ketentuan; b. Perencanaan terkait dengan Kualifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	Juni - Desember 2025	
					2	Data tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Petugas melakukan kesalahan dalam menginput data lapangan (Kompetensi SDM Rendah (Man), komputer mengalami kerusakan (Machine))	C	Target kegiatan tidak terpenuhi	Pengecekan ulang oleh bidang	2	4	8	Sedang	Manajerial yang optimal	PPTK Bidang Bina Marga	Juni - Desember 2025	
3					Pekerjaan terlambat diserahkan	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari intansi terkait	3	3	9	Sedang	Diterbitkan surat peringatan pertama, kedua, ketiga dan dilaksanakan Show Cause Meeting (SCM)	PPTK Bidang Bina Marga	Juni - Desember 2025		
5	Pemeliharaan Rutin Jalan	1	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin = 674,58 Km	1	Kegiatan survey dilakukan terlalu lama	Adanya kerusakan yang perlu diperbaiki terlalu banyak dan detail	C	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan pengadaan	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara cepat, tepat akurat dan detail kemudian dituangkan dalam RMK dan penambahan personil	3	3	9	Sedang	Membagi pekerjaan pelaksanaan survey kepada Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Februari - Desember 2025		
				2	Perubahan Volume Pekerjaan dalam penyusunan HPS	Terjadi perubahan penetapan pagu HPS	C	Terlambatnya pelaksanaan penyiapan syarat lelang	pembagian tugas dalam menyiapkan penyusunan dokumen lelang	3	3	9	Sedang	Segera melakukan koordinasi apabila terjadi perubahan volume item pekerjaan	PPTK Bidang Bina Marga	Februari - Desember 2025		
				3	Kesiapan administrasi penyedia jasa tidak tepat waktu	Penertiban Jaminan Pelaksanaan terikat oleh regulasi Bank Penjamin	C	Terlambatnya pelaksanaan kontrak	Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis	3	2	6	Sedang	a. Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis, b. dilakukan koordinasi secara intens	PPTK Bidang Bina Marga	Februari - Desember 2025		

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																		
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	1	Anggaran Subsidi yang tidak tersedia	Sumber anggaran yang berasal dari dana transfer daerah	C	Anggaran subsidi yang tidak tersedia menyebabkan operasional SPAM Regional Kartamantul menjadi terhambat	Adanya prioritas penganggaran	3	3	9	Sedang	Adanya koordinasi dengan Pemda DIY dan Dinas Teknis untuk pengadaan Subsidi Dana Operasional Produksi	PPTK Bidang Cipta Karya	Januari-Desember
						2	Kinerja proses Produksi dan Distribusi Air Minum oleh SPAM Regional terhambat	Kekurangan Anggaran untuk biaya operasional produksi dan distribusi	C	Kekurangan biaya operasional seperti pembiayaan jasa listrik akan menyebabkan terhambatnya kinerja peralatan dan produksi air minum	Adanya prioritas pembiayaan untuk operasional produksi dan distribusi air minum	3	3	9	Sedang	Adanya koordinasi dengan Pemda DIY dan Dinas Teknis untuk pengadaan Subsidi Dana Operasional Produksi	PPTK Bidang Cipta Karya	Januari-Desember
		2	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1	Anggaran optimalisasi SPAM yang tidak tersedia	Sumber anggaran yang berasal dari dana transfer daerah	C	Anggaran Optimalisasi SPAM yang tidak tersedia menyebabkan tidak adanya anggaran untuk pengadaan pompa intake sehingga operasional SPAM Regional Kartamantul menjadi terhambat	Adanya prioritas penganggaran	3	3	9	Sedang	Adanya koordinasi dengan Pemda DIY dan Dinas Teknis untuk pengadaan dana pengadaan pompa intake	PPTK Bidang Cipta Karya	Januari-Desember
						2	Belum optimal dan maksimalnya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan SPAM	Operasional dan Pemeliharaan beberapa peralatan di SPAM Lintas Kabupaten/Kota terhambat karena kekurangan biaya operasional	C	Kekurangan biaya operasional seperti pembiayaan jasa listrik akan menyebabkan terhambatnya kinerja peralatan dan produksi air minum	pengaturan jadwal produksi air minum oleh SPAM Regional dan pengelolaan keuangan untuk prioritas operasional produksi	3	3	9	Sedang	Adanya koordinasi dengan Pemda DIY dan Dinas Teknis untuk pengadaan Subsidi Dana Operasional Produksi	PPTK Bidang Cipta Karya	Januari-Desember
						3	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Cipta Karya	Januari - maret
						4	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	waktu pengiriman pompa yang melebihi target perencanaan	C	mundurnya waktu pelaksanaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Cipta Karya	Maret-Desember
	3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	Penyusunan KAK yang terlambat tidak sesuai dengan jadwal	Manajemen waktu pelaksanaan penyusunan KAK kurang bagus	C	Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana.	pembuatan target waktu penyelesaian penyusunan KAK	3	3	9	Sedang	dibuatkan tabel jadwal kegiatan (Meningkatkan kinerja agar penyusunan KAK tepat waktu tidak terlambat)	PPTK Bidang Cipta Karya	Januari-Maret	
					2	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Cipta Karya	Januari - maret	
					3	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan penyusunan kurang baik	C	mundurnya waktu pelaksanaan	Monitoring pekerjaan penyusunan dokumen	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Cipta Karya	Maret-Desember	

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																		
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi	1	Penyusunan KAK yang terlambat tidak sesuai dengan jadwal	Manajemen waktu pelaksanaan penyusunan KAK kurang bagus	C	Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana.	pembuatan target waktu penyelesaian penyusunan KAK	3	3	9	Sedang	dibuatkan tabel jadwal kegiatan (Meningkatkan kinerja agar penyusunan KAK tepat waktu tidak terlambat)	PPTK Bidang Cipta Karya	Januari-Maret
						2	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Cipta Karya	Januari - maret
						3	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan penyusunan kurano baik	C	mundurnya waktu pelaksanaan	Monitoring pekerjaan penyusunan dokumen	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Cipta Karya	Maret-Desember
				2	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional : 36,71%	1	Waktu penyusunan DED	Pelaksanaan pemeliharaan jaringan air limbah kota yogyakarta (jalan mataram) berdasarkan DED yang sudah dibuat	C	Penyusunan DED yang tidak tepat waktu dapat berpengaruh pada mundurnya waktu pelaksanaan pekerjaan.	data pendukung dalam penyusunan DED disiapkan lebih awal.	2	2	4	Rendah	Persiapan penyusunan DED dilaksanakan lebih awal.	PPTK Balai PALPJK	Maret, April, Mei
		2	Penyusunan KAK yang terlambat tidak sesuai dengan jadwal	Manajemen waktu pelaksanaan penyusunan KAK kurang bagus		C	Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana.	pembuatan target waktu penyelesaian penyusunan KAK	3	3	9	Sedang	dibuatkan tabel jadwal kegiatan (Meningkatkan kinerja agar penyusunan KAK tepat waktu tidak terlambat).	PPTK Balai PALPJK	Maret, Mei, Juni			
		3	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurano dari 3		C	Target jumlah pendaftar tidak terpenuhi	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	Mempermudah syarat pelelangan	PPTK Balai PALPJK	Juni, Juli			
		4	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas		C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	PPTK Balai PALPJK	Juni, Juli, Agustus			
		5	Pemeliharaan yang kurang maksimal	Kurangnya pengawasan		C	Hasil pemeliharaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	PPTK Balai PALPJK	September, Oktober, November			
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																		
1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pembangunan bangunan gedung Negara, 5 Kabupaten/Kota	1	Kegiatan survei di banyak lokasi dengan SDM yang terbatas	kegiatan tidak selesai tepat waktu	UC	kegiatan tidak selesai tepat waktu yang ditentukan	Melaksanakan optimalisasi survey dengan SDM dan waktu yang ada	3	3	9	Sedang	menambah personil survey	PPTK Bidang Cipta Karya	Januari-Desember 2025
		2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan GEdung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1	Seleksi gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat seleksi sesuai ketentuan yang berlaku; b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Cipta Karya	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja. (Mei - Okt 2025) 180 Hari Kalender

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG

1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis : 2 Dokumen (Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Bantul dan Kab. Gunungkidul)	1	Terjadinya kecelakaan kerja	Penggunaan alat berat	C	Luka ringan s.d. berat pada pekerja dan masyarakat;	Pelaksanaan prosedur kerja yang benar sesuai dengan SOP;	3	2	6	Sedang	monitoring penerapan SMKK pada lokasi pelaksanaan pekerjaan	PPTK Bidang SDAD	Juni s.d. November 2025
					2	Tidak ditemukannya air sesuai dengan spesifikasi dan syarat yang ditentukan dalam kontrak	Faktor alam yang tidak bisa diprediksi (struktur geologi lingkungan setempat)	UC	Konstruksi dianggap gagal dan tidak dapat dibayarkan	Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada hasil kajian dokumen perencanaan SED Geologi Lingkungan Air Tanah	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan kegiatan monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan agar pelaksanaan sesuai dengan hasil kajian SED; b. Koordinasi dengan Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Bidang ESDM	PPTK Bidang SDAD	Juni s.d. November 2025	
					3	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar teknis yang disyaratkan dalam dokumen kontrak	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Berpotensi menyebabkan kerusakan fungsi dan umur bangunan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan monitoring pelaksanaan pekerjaan oleh pengawas lapangan b. Rapat koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Direksi Lapangan	PPTK Bidang SDAD	Juni s.d. November 2025	
					4	Perubahan rencana lokasi usulan	Lokasi usulan terlayani PDAM dan SPAMDES	C	Pelaksanaan Pekerjaan Tertunda	Membuat Data Cadangan Usulan	3	2	6	Sedang	a. Dilakukan identifikasi awal terkait lokasi rencana sumur bor sebelum kegiatan dimulai; c. melakukan verifikasi data usulan agar lebih valid.	PPTK Bidang SDAD	Mei 2025	
					5	Terjadinya kerusakan alat bor dan <i>waterloss</i>	Ketidakpastian faktor Geologi di dalam tanah, terutama keberadaan rongga-rongga serta kekerasan lapisan batuan meskipun sudah dilaksanakan pengukuran geolistrik	C	Pelaksanaan pekerjaan terlambat/tidak selesai tepat waktu	Monitoring pelaksanaan pekerjaan dari Pengawas Lapangan maupun Direksi Lapangan	2	4	8	Sedang	Mengoptimalkan kegiatan monitoring pekerjaan dari Pengawas Lapangan, Direksi Lapangan didampingi oleh Pejabat Pembuat Komitmen	PPTK Bidang SDAD	Juni s.d. November 2025	
	2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis : 1 Dokumen (Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Kulon Progo)	1	Terjadinya kecelakaan kerja	Penggunaan alat berat	C	Luka ringan s.d. berat pada pekerja dan masyarakat;	Pelaksanaan prosedur kerja yang benar sesuai dengan SOP;	3	2	6	Sedang	monitoring penerapan SMKK pada lokasi pelaksanaan pekerjaan	PPTK Bidang SDAD	Juni s.d. November 2025	
						2	Tidak ditemukannya air sesuai dengan spesifikasi dan syarat yang ditentukan dalam kontrak	Faktor alam yang tidak bisa diprediksi (struktur geologi lingkungan setempat)	UC	Konstruksi dianggap gagal dan tidak dapat dibayarkan	Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada hasil kajian dokumen perencanaan SED Geologi Lingkungan Air Tanah	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan kegiatan monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan agar pelaksanaan sesuai dengan hasil kajian SED; b. Koordinasi dengan Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Bidang ESDM	PPTK Bidang SDAD	Juni s.d. November 2025
						3	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar teknis yang disyaratkan dalam dokumen kontrak	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Berpotensi menyebabkan kerusakan fungsi dan umur bangunan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan monitoring pelaksanaan pekerjaan oleh pengawas lapangan b. Rapat koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Direksi Lapangan	PPTK Bidang SDAD	Juni s.d. November 2025
						4	Perubahan rencana lokasi usulan	Lokasi usulan terlayani PDAM dan SPAMDES	C	Pelaksanaan Pekerjaan Tertunda	Membuat Data Cadangan Usulan	3	2	6	Sedang	a. Dilakukan identifikasi awal terkait lokasi rencana sumur bor sebelum kegiatan dimulai; c. melakukan verifikasi data usulan agar lebih valid.	PPTK Bidang SDAD	Mei 2025
						5	Terjadinya kerusakan alat bor dan <i>waterloss</i>	Ketidakpastian faktor Geologi di dalam tanah, terutama keberadaan rongga-rongga serta kekerasan lapisan batuan meskipun sudah dilaksanakan pengukuran geolistrik	C	Pelaksanaan pekerjaan terlambat/tidak selesai tepat waktu	Monitoring pelaksanaan pekerjaan dari Pengawas Lapangan maupun Direksi Lapangan	2	4	8	Sedang	Mengoptimalkan kegiatan monitoring pekerjaan dari Pengawas Lapangan, Direksi Lapangan didampingi oleh Pejabat Pembuat Komitmen	PPTK Bidang SDAD	Juni s.d. November 2025

1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu : 1 Dokumen (Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi: 1 Paket)	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	April - Agustus 2025
				2	Tidak semua warga sekitar mengetahui adanya pekerjaan di lokasi	Kurangnya sosialisasi mengenai undangan sosialisasi	C	Kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	Melakukan sosialisasi ke semua warga di sekitar lokasi pekerjaan	2	4	8	Sedang	a. Sosialisasi awal kepada masyarakat, b. Dilakukan koordinasi penentuan jadwal sosialisasi kepada ketua Kelompok masyarakat	PPTK Bidang Bina Marga	April - Agustus 2025
				3	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat	Tidak ada manajemen lalu lintas, pelaksanaan pekerjaan saat musim kemarau, penggunaan peralatan bising	C	Kemacetan lalu lintas di permukiman; Peningkatan polusi debu dan kebisingan	Pengaturan lalu lintas dengan rambu; Penyiraman rutin pada lokasi pekerjaan	3	3	9	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	April - Agustus 2025
				4	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Bina Marga	April - Agustus 2025
				5	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	April - Agustus 2025
2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh: 1 Dokumen (Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu: 6,00 Km)	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	April - Desember 2025
				2	Tidak semua warga sekitar mengetahui adanya pekerjaan di lokasi	Kurangnya sosialisasi mengenai undangan sosialisasi	C	Kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	Melakukan sosialisasi ke semua warga di sekitar lokasi pekerjaan	2	4	8	Sedang	a. Sosialisasi awal kepada masyarakat, b. Dilakukan koordinasi penentuan jadwal sosialisasi kepada ketua Kelompok masyarakat	PPTK Bidang Bina Marga	April - Desember 2025
				3	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat	Tidak ada manajemen lalu lintas, pelaksanaan pekerjaan saat musim kemarau, penggunaan peralatan bising	C	Kemacetan lalu lintas di permukiman; Peningkatan polusi debu dan kebisingan	Pengaturan lalu lintas dengan rambu; Penyiraman rutin pada lokasi pekerjaan	3	3	9	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	April - Desember 2025
				4	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Bina Marga	April - Desember 2025
				5	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	April - Desember 2025

	3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo	1	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo : 1 Dokumen (Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Prambanan-Gayamharjo Segmen B4 dan B5: 0,95 Km)	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	Maret - Desember 2025
					2	Tidak semua warga sekitar mengetahui adanya pekerjaan di lokasi	Kurangnya sosialisasi mengenai undangan sosialisasi	C	Kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	Melakukan sosialisasi ke semua warga di sekitar lokasi pekerjaan	2	4	8	Sedang	a. Sosialisasi awal kepada masyarakat, b. Dilakukan koordinasi penentuan jadwal sosialisasi kepada ketua Kelompok masyarakat	PPTK Bidang Bina Marga	Maret - Desember 2025
					3	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat	Tidak ada manajemen lalu lintas, pelaksanaan pekerjaan saat musim kemarau, penggunaan peralatan bising	C	Kemacetan lalu lintas di permukiman; Peningkatan polusi debu dan kebisingan	Pengaturan lalu lintas dengan rambu; Penyiraman rutin pada lokasi pekerjaan	3	3	9	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Maret - Desember 2025
					4	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Maret - Desember 2025
					5	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Maret - Desember 2025
	1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1	Kondisi bangunan kotor dan tidak terpelihara	Personil yang ditunjuk untuk melakukan pemeliharaan tidak sesuai dengan kontrak	C	Menurunnya kenyamanan pengunjung	a. Koordinasi dengan pelaksana penyedia jasa, b. Dilakukan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga kebersihan	4	3	12	Tinggi	Melaksanakan jadwal pelaksanaan pemeliharaan secara rutin	PPTK Bidang Cipta Karya	Januari-Desember
					2	Seleksi gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat seleksi sesuai ketentuan yang berlaku; b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Cipta Karya	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja. (Juli - Nov 2025) 150 Hari Kalender

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi : 1 dokumen	1	Kegiatan dilaksanakan tidak tepat waktu	Butuh waktu lebih lama untuk mengidentifikasi data primer dan sekunder	C	pengumpulan data primer dan sekunder lebih lama dari rencana sehingga berdampak pada pelaksanaan pekerjaan tidak tepat waktu	Rapat internal untuk monitoring dan progress kegiatan	3	3	9	Sedang	Koordinasi dengan pelaksana pekerjaan dan tim teknis	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan April - Juli 2025 (4 bulan)
							2	Data yang terkumpul tidak valid dan aktual	Ketersediaan data yang tidak dimiliki oleh narasumber kunci (contoh: kalurahan/kapanewon/OPD pengampu/ Kraton)	UC	Proses penyusunan rekomendasi kebijakan akan mengalami kendala	penyepakatan data	2	2	4	Rendah	Melakukan komunikasi yang intensif dan berkala dengan berbagai unsur-unsur/stakeholder untuk meningkatkan kualitas data.	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan April - Juli 2025 (4 bulan)
	2	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	1	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi : 1 dokumen	1	data yang dibutuhkan untuk memiliki format yang beragam	masing-masing OPD pengampu memiliki format data yg beragam	C	kendala dalam proses updating sistem	penyepakatan format data	2	2	4	Rendah	berkomunikasi dengan kabupaten/kota untuk penyepakatan format data	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan Juli - Oktober 2025 (4 bulan)		
					2	Tampilan sistem informasi tidak user friendly	Banyak data yang ingin ditampilkan	C	Kendala dalam proses input data dan penyajian data	uji coba sistem kepada user	3	3	9	Sedang	berkoordinasi dengan kab/kota terkait tampilan sistem	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan Juli - Oktober 2025 (4 bulan)		
					3	Aplikasi berbasis website diserang oleh eksternal	Adanya kelemahan pada sistem	UC	adanya data yang tidak terekam pada sistem aplikasi	melakukan backup data secara berkala	4	4	16	Tinggi	berkoordinasi dengan Dinas Kominfo terkait sistem informasi	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan Juli - Oktober 2025 (4 bulan)		

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1	Pengembangan Lumbung Mataraman	1	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	1	Pekerjaan terlambat diserahkan	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus		Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari intansi terkait	3	3	9	Sedang	Diterbitkan surat peringatan pertama, kedua, ketiga dan dilaksanakan Show Cause Meeting (SCM)	PPTK Bidang SDAD	Mei s.d. Nopember 2024
					2	Pelaksanaan pekerjaan mundur dari jadwal	waktu pengadaan yang mundur dari jadwal rencana kegiatan	C	Terlambatnya pelaksanaan kontrak	Mengadakan rapat evaluasi kegiatan	3	3	9	Sedang	Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis	PPTK Bidang SDAD	Mei s.d. Nopember 2024	
					3	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan secara rutin	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan hasil monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang SDAD	Mei s.d. Nopember 2024	
					4	Potensi kecelakaan kerja;	tidak menggunakan alat pelindung diri dalam pekerjaan, terjadi kelalaian dalam bekerja di lapangan	C	Luka ringan s.d. berat pada pekerja dan masyarakat;	Pelaksanaan prosedur kerja yang benar sesuai dengan SOP;	4	3	12	Tinggi	Pengawasan K3 pelaksanaan konstruksi	PPTK Bidang SDAD	Mei s.d. Nopember 2024	
					5	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat.	Tidak ada manajemen lalu lintas, pelaksanaan pekerjaan saat musim kemarau, penggunaan peralatan bising;	C	Kemacetan lalu lintas di permukiman; Peningkatan polusi debu dan kebisingan;	Pengaturan lalu lintas dengan rambu; Penyiraman rutin pada jalan dan lokasi kerja;	4	3	12	Tinggi	a. Pertemuan berkala dengan masyarakat/menggunakan teleconference maupun langsung; b. Pendekatan sosial masyarakat	PPTK Bidang SDAD	Mei s.d. Nopember 2024	
					6	Harga berubah sewaktu-waktu	Perencanaan kurang matang dalam menentukan nilai kebutuhan	C	Pekerjaan tidak sesuai target	adanya rencana anggaran hingga tercapai target	3	3	9	Sedang	a. Adanya rencana anggaran hingga tercapai target serta monev yang ketat , b. dilakukan evaluasi harga sebelum proses pengadaan	PPTK Bidang SDAD	Mei s.d. Nopember 2024	
					7	Kesiapan administrasi penyedia jasa tidak tepat waktu	kurangnya tenaga pendukung dalam memproses administrasi pekerjaan	C	Terlambatnya tanda tangan kontrak	Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis	3	3	9	Sedang	Pengecekan antara penyedia jasa konsultan dan kontraktor	PPTK Bidang SDAD	Mei s.d. Nopember 2024	
1	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : 391 unit	1	Tidak semua kalurahan calon penerima mengetahui ada pekerjaan BKK	Belum tersosialisasinya kegiatan secara menyeluruh	C	kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	melakukan sosialisasi dan menghimbau desa untuk berkoordinasi dengan dukuh dan calon penerima bantuan	2	2	4	Rendah	sosialisasi dilakukan secara berkala, dan menjalin komunikasi informal dengan pengampu lokasi (contoh: panrwu/lurah/RT)	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Maret - April 2025 (2 bulan)
					2	Tidak semua kalurahan sudah berpengalaman dalam pengadaan barang dan jasa	tiap kelurahan memiliki sumberdaya yang beragam dan pengalaman yang berbeda	UC	keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa	komunikasi secara informal antara OPD dengan kalurahan penerima BKK	4	4	16	Tinggi	1. Sosialisasi dilakukan sebelum awal pelaksanaan pekerjaan kepada kalurahan penerima BKK agar bisa mempersiapkan. 2. Tenaga ahli pendamping akan diminta untuk mendampingi mulai dari proses PBJ sampai pelaporan akhir.	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mei - Juli 2025 (3 bulan)	
					2	Kurangnya pengawasan saat <i>dropping</i> material	1) lokasi rumah penerima bantuan dengan medan beragam; 2) penerima bantuan tidak hadir/diwakilkan saat sosialisasi; 3)Tenaga Ahli Pendamping tidak hadir saat <i>dropping</i> material.	C	kualitas dan kuantitas material tidak sesuai dengan kontrak antara penyedia dengan kalurahan	warga dilibatkan dalam mengawasi <i>dropping</i> material	4	4	16	Tinggi	1) Meminta kalurahan untuk menunjuk koordinator dari masyarakat; 2) Melakukan koordinasi dengan koordinator dan penyedia jasa dalam melakukan <i>dropping</i> material	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Juni - Oktober 2025 (5 bulan)	

3	Pelaksanaan pembangunan baru rumah layak huni membutuhkan waktu lebih lama	1) Material sudah terima akan tetapi karena masih membutuhkan swadaya sehingga utk pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan baru terlambat 2) jalan yang tidak bisa diakses kendaraan besar sehingga material tidak langsung di rumah penerima	C	pelaksanaan pembangunan baru rumah layak huni tidak sesuai jadwal	melakukan sosialisasi dan menghimbau desa untuk berkoordinasi dengan dukuh dan calon penerima bantuan bahwa pekerjaan membutuhkan keswadayaan dan persiapan teknis	4	3	12	Tinggi	1) Meminta desa/koordinator untuk memberdayakan tukang dari desa setempat/daerah lain; 2) Melakukan koordinasi dengan koordinator dan penerima bantuan untuk segera dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Juni - Oktober 2025 (5 bulan)
4	Terdapat penerima bantuan tidak layak mendapatkan bantuan	Identifikasi penerima bantuan belum di <i>update</i>	UC	adanya perubahan BNBA	verifikasi penerima bantuan	2	2	4	Rendah	meminta kalurahan untuk menyiapkan BNBA pengganti	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	April - Juni 2025 (3 bulan)
5	Perubahan dan/atau penambahan jenis material diluar panduan dari OPD pendamping	masyarakat sudah memiliki salah satu jenis material, sehingga kalurahan melakukan penyesuaian saat proses PBJ	C	ada material yang tidak sesuai dengan RAB	Melaksanakan sosialisasi kepada kalurahan sebelum proses PBJ	4	3	12	Tinggi	tenaga ahli pendamping diminta untuk mengkoscek RAB yang disusun kalurahan dengan RAB pada panduan OPD	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	April - Juni 2025 (3 bulan)
6	Kesiapan data pemerintah desa	Kurangnya informasi dan koordinasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam menentukan titik lokasi yang akan direncanakan	UC	kesulitan dalam menentukan titik lokasi yang pasti	Dilakukan koordinasi antar perangkat desa dengan masyarakat dalam menentukan titik lokasi.	4	3	12	Tinggi	sosialisasi dilakukan secara berkala, dan menjalin komunikasi informal dengan pengampu lokasi (contoh: camat/lurah/RT).	PPTK Bidang Perumahan	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Dari bulan Februari s/d Maret (1 bulan)
7	Tidak semua warga mengetahui ada pekerjaan di lokasi	belum tersosialisasinya kegiatan secara menyeluruh	UC	kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	melakukan sosialisasi dan menghimbau kelurahan untuk mengkoordinasikan dengan warga	2	3	6	Sedang	sosialisasi dilakukan secara berkala, dan menjalin komunikasi informal dengan pengampu lokasi (contoh: camat/lurah/RT).	PPTK Bidang Perumahan	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Dari bulan Februari s/d Oktober (9 bulan)
8	Kegiatan survei lokasi perencanaan dilakukan terlalu lama	adanya perubahan lokasi/jenis pekerjaan dari desa.	UC	kegiatan tidak selesai tepat waktu	memberi tenggang waktu untuk perubahan lokasi/jenis pekerjaan	2	5	10	Tinggi	meminta desa untuk mengonfirmasi list lokasi yang akan disurvei saat sosialisasi dan menunjuk contact person lokasi yang akan disurvei	PPTK Bidang Perumahan	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Dari bulan Februari s/d Maret (1 bulan)
9	Perubahan jenis pekerjaan	masyarakat mengusulkan jenis pekerjaan yang berbeda yang dirasa lebih dibutuhkan	UC	tidak sesuai usulan masyarakat dengan proposal awal dan dokumen anggaran.	melakukan sosialisasi dan pemahaman agar tidak ada perubahan mendasar	2	2	4	Rendah	sosialisasi dilakukan secara berkala, dan menjalin komunikasi informal dengan pengampu lokasi (contoh: camat/lurah/RT).	PPTK Bidang Perumahan	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Dari bulan Juli s/d Oktober (4 bulan)
10	Jenis pekerjaan sudah dilakukan instansi lain / swadaya oleh masyarakat	instansi dari pemerintah pusat dan/atau kabupaten kota yang bertugas menangani kawasan dan sektor yang sama	UC	adanya pekerjaan yang tidak jadi dilaksanakan Tidak optimanya serapan anggaran	berkoordinasi dengan instansi - instansi yang melaksanakan kegiatan yang sama	3	5	15	Tinggi	Mengadakan koordinasi berkala dengan OPD pengampu PKP di kabupaten/kota Mengoptimalkan peran desa / LPMD dalam berkoordinasi dengan pemkba/pemkot.	PPTK Bidang Perumahan	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Dari bulan Juli s/d Oktober (4 bulan)
11	Kurangnya pengawasan pada saat penyelesaian pekerjaan konstruksi	tidak cocoknya antara jadwal kegiatan pada pekerjaan yang telah ditentukan dengan yang di lapangan	C	kegiatan fisik tidak selesai dengan tepat waktu dan material yang tidak sesuai standar	melibatkan aparat desa dan masyarakat dalam mengawasi	3	5	15	Tinggi	meminta desa untuk menunjuk koordinator dari masyarakat	PPTK Bidang Perumahan	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Dari bulan Juli s/d Oktober (4 bulan)

PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN																		
1	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	Materi pembinaan yang diberikan tidak sesuai terkini/tidak <i>update</i> dan ketentuan teknis tidak jelas	Dinamika yang sangat cepat pada regulasi pengaturan perusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah di pemerintah pusat selaku pemilik kewenangan perizinan.	C	Terjadi kekeliruan informasi yang diberikan kepada peserta pembinaan	Berkoordinasi dengan Badan Geologi untuk memohon <i>update</i> informasi regulasi yang berlaku	2	5	10	Tinggi	Mengundang narasumber dari Badan Geologi dalam acara Pembinaan Pelaksanaan Penggunaan Air Tanah	Kepala Seksi Sumber Daya Geologi dan Mineral	Bulan Mei 2025
						2	Pengukuran dengan AWLR mengalami kerusakan/ <i>offline</i>	Perangkat AWLR mengalami kerusakan komponen maupun kendala <i>offline</i> akibat tidak adanya pemeliharaan/ perawatan perangkat	C	Data Muka Air Tanah pada Sumur Pantau menjadi tidak diketahui dan mengganggu monitoring dan evaluasi fluktuasi Muka Air Tanah	Pemeliharaan sederhana melalui Preservasi Sumur Pantau	5	1	5	Sedang	Melakukan pengukuran kedudukan Muka Air Tanah pada Sumur Pantau secara manual dengan <i>water level sounding</i> secara berkala setiap bulan	Kepala Seksi Sumber Daya Geologi dan Mineral	Januari - Desember
						3	Perbaikan dan pemeliharaan Sumur Pantau dengan dana terbatas melalui Preservasi Sumur Pantau	Tingkat kerusakan Sumur Pantau bersifat dinamis seiring berjalannya waktu	C	Ketidaktepatan pemilihan prioritas Sumur Pantau yang memerlukan perbaikan/ pemeliharaan segera	Monitoring kondisi Sumur Pantau bulanan	4	2	8	Sedang	Analisis kondisi kerusakan Sumur Pantau dengan menyesuaikan pagu yang ada	Kepala Seksi Sumber Daya Geologi dan Mineral	Juli
2	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah		Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan, dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi: 1 Laporan	1	Tidak maksimalnya pelaksanaan perumusan dan penghitungan NPA pasca terbitnya Pergub turunan Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan NPA	Transisi kewenangan perumusan dan penghitungan NPA dari Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota	C	Ketidaklancaran penetapan Pajak Air Tanah dikarenakan perubahan kewenangan perumusan dan penghitungan NPA sebagai dasar penetapan besaran Pajak Air Tanah dari Pemda DIY kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pelibatan BKAD Kabupaten/ Kota dalam penyusunan rancangan Pergub DIY tentang Penetapan NPA yang direncanakan terbit pada tahun 2025	4	4	16	Tinggi	Monitoring dan Evaluasi dengan BKAD Kabupaten/ Kota mengenai pelaksanaan Penetapan NPA setelah Pergubnya terbit	Kepala Seksi Sumber Daya Geologi dan Mineral	Oktober
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA																		
1	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1	Pembinaan tidak memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang baik dan benar	Tingkat kesadaran pelaku usaha pertambangan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar masih rendah	C	Kaidah pertambangan yang baik dan benar tidak diterapkan sehingga membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar dan tidak memberikan dampak kesejahteraan masyarakat	Sosialisasi akan pentingnya penerapan kaidah pertambangan yang baik dan benar bagi kelanjutan usaha pertambangan serta pemberian sanksi bagi yang belum menerapkan atau melanggar	3	3	9	Sedang	Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan usaha pertambangan dan pelaku usaha pertambangan	PPTK Bidang ESDM	Januari-Desember
						2	Rencana reklamasi dan rencana pascatambang wilayah pertambangan rakyat tidak sesuai dengan kondisi akhir pertambangan rakyat dan tidak sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang serta permintaan pemilik lahan dan pemerintah setempat	(i) survei pelaksanaan tambang rakyat tidak dilakukan di semua lokasi tambang dan kurang detail	C	Rencana reklamasi dan rencana pascatambang kegiatan pertambangan rakyat tidak dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan reklamasi dan pascatambang kegiatan pertambangan rakyat	Memerintahkan kepada penyedia jasa agar melaksanakan pekerjaan dan survei dengan benar di semua lokasi tambang rakyat dan lebih detail menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang beserta biaya yang dibutuhkan	3	3	9	Sedang	Koordinasi dan komunikasi dengan Penyedia Barang/ Jasa, pemilik lahan, pemerintah setempat dan pelaku tambang rakyat	PPTK Bidang ESDM	Juli-Desember

2	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	1	kelanjutan izin-izin yang dikeluarkan pusat dengan ketentuan persyaratan yang lebih longgar dengan ketentuan Pergub Nomor 39 Tahun 2022 yang lebih ketat dapat menimbulkan permasalahan penerbitan	Ketentuan Pergub 39 Tahun 2022 dalam penerbitan izin lebih ketat dan memerlukan rekomendasi/persetujuan dari instansi lain	C	pelayanan perizinan perusahaan pertambangan lebih lama, adanya keberatan dari pemohon izin perusahaan pertambangan	sosialisasi pelaksanaan Pergub 84 tahun 2024 dan identifikasi permasalahan pelaksanaan pergub tersebut	2	3	6	Sedang	koordinasi dengan DPMPTSP, OPD penerbit rekomendasi/persetujuan dan Biro Hukum Setda DIY	PPTK Bidang ESDM	Januari-Desember
						2	Penyusunan Raperda kurang aplikatif untuk diterapkan dan kurang mengakomodir ketentuan dan kearifan lokal yang sesuai dengan kondisi DIY	(i) Penyusunan Perda hanya mengacu ke Peraturan yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional (ii) Penyusunan Perda tidak mengakomodir aspirasi pelaku usaha pertambangan	C	Peraturan Daerah kurang optimal dan sulit diterapkan dalam pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan	1. Penekanan terhadap kearifan lokal dan kondisi demografi DIY 2. Menjaring masukan dari pelaku usaha pertambangan	2	3	6	Sedang	Koordinasi dan komunikasi dengan, OPD yang bertanggung jawab terhadap perusahaan pertambangan dan asosiasi pelaku tambang	PPTK Bidang ESDM	Februari-September

PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

1	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1	Jumlah prosedur dan persyaratan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	1	Kelengkapan data administrasi dan teknis belum benar dan lengkap	Pemohon belum memahami secara menyeluruh persyaratan administrasi dan teknis pengajuan IUPTLS /LUPTLS (izin operasi)/IUJPTL	C	Pengembalian berkas permohonan	(i) penyempurnaan keterangan persyaratan/prosedur pengajuan izin (ii) penyampaian informasi penjelasan persyaratan permohonan izin	2	2	4	Rendah	Melakukan koordinasi dengan DPM PTSP DIY dan memberikan instrumen penjelasan/informasi terkait persyaratan perizinan agar dapat tersampaikan kepada calon pemohon.	Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	Januari - Juni
						2	Keterlambatan proses penerbitan rekomendasi teknis/verifikasi teknis permohonan izin	(i) Gap rasio personil verifikator dengan jumlah permohonan (ii) Kendala notifikasi OSS (iii) Data teknis pengajuan izin tidak lengkap dan benar	C	Pemenuhan standart SOP terhambat	(i) Pengaturan jadwal dan skala prioritas (ii) Penugasan personil pemantau OSS	2	2	4	Rendah	(i) merumuskan inovasi verifikasi cepat (ii) melakukan review penugasan personil pemantau OSS	Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	Januari - Desember
						3	Pembinaan perizinan ketenagalistrikan tidak optimal	(i) kurangnya kepedulian obyek / pelaku wajib izin ketenagalistrikan (ii) informasi urgensi izin ketenagalistrikan tidak tersampaikan dengan baik (iii) metode pembinaan yang kurang efektif	C	Laju pertumbuhan izin ketenagalistrikan rendah	publikasi regulasi dan urgensi izin ketenagalistrikan	2	2	4	Rendah	(i) menyiapkan instrumen publikasi (ii) menyusun surat himbuan perizinan ketenagalistrikan (iii) koordinasi dengan Balai Pengawasan dan Pengendalian ESDM.	Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	Januari-Desember

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

1	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka Energi Baru Terbarukan	1	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1	Informasi pemanfaatan potensi EBT tidak terpublikasikan dengan baik kepada masyarakat	(i) cakupan target sosialisasi tidak merata (ii) tidak melibatkan stakeholder yang terlibat dalam pemanfaatan EBT di DIY	C	(i) Peran serta masyarakat dalam pengembangan EBT menjadi kecil (ii) Capaian pemanfaatan EBT tidak sesuai target	(i) pemetaan stakeholder EBT di DIY secara komprehensif (ii) pemilihan metode publikasi yang tepat	2	2	4	Rendah	Rapat koordinasi dan dapat dengan melibatkan akademisi	Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	Januari-Desember
						2	Pendataan pemanfaatan ebt tidak akurat	Metode perolehan data tidak tepat	C	Perhitungan capaian pemanfaatan ebt tidak tepat	standarisasi pendataan pemanfaatan ebt	2	2	4	Rendah	(i) Pembuatan form standart pendataan pemanfaatan ebt (ii) monev pencapaian pemanfaatan ebt	Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	Januari-Desember
						3	Pemeliharaan pembangkit EBT tidak optimal	(i) pemilihan material tidak sesuai kondisi (ii) metode pemeliharaan tidak sesuai	C	Operasional pembangkit ebt tidak optimal	analisa detil kebutuhan pemeliharaan dan kondisi lingkungan pembangkit ebt	2	2	4	Rendah	Pembuatan analisa kondisi eksisting pembangkit dan rencana kebutuhan pemeliharaan ebt	Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	Selama masa pelaksanaan pekerjaan (Mei-Agustus)

BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL																	
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGIAN																	
1	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 1 Laporan	1	Pemanfaatan air tanah yang berlebih, tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku	Kurangnya kesadaran pelaku pemanfaatan air tanah untuk mengambil air tanah sesuai regulasi yang berlaku	C	Pemanfaatan air tanah yang berlebihan dapat mengakibatkan menurunnya erata muka air tanah melebihi batas aman	3	3	9	Sedang	Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan air tanah untuk mendukung konservasi air tanah sesuai dengan regulasi dan SOP yang berlaku	PPTK Balai PPESDM	Januari-Desember
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA																	
1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil: 2 Laporan	1	Kegiatan usaha pertambangan dilakukan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku	Kurangnya ketaatan pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai regulasi yang berlaku	C	Adanya konflik terhadap pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan dan maraknya penambangan tanpa izin	4	4	16	Tinggi	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sesuai regulasi dan SOP yang berlaku, serta Inventarisasi Penambangan Tanpa Izin	PPTK Balai PPESDM	Januari-Desember
2	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut: 2 Laporan	1	Kegiatan usaha pertambangan dilakukan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku	Kurangnya kepatuhan pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dokumen perizinan	C	Pelaksanaan usaha pertambangan tidak dilakukan sesuai dengan kaidah teknis pertambangan dan tata kelola perusahaan pertambangan	4	4	16	Tinggi	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	PPTK Balai PPESDM	Januari-Desember
3	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam: 1 Laporan	1	Tidak terkendalinya harga jual mineral bukan logam dan batuan (MBLB)	- Pemegang izin tidak melaksanakan penjualan sesuai harga patokan yang berlaku - Adanya komoditas MBLB yang berasal dari Penambangan Tanpa Izin	C	Persaingan harga jual MBLB	3	3	9	Sedang	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan MBLB sesuai regulasi dan SOP yang berlaku	PPTK Balai PPESDM	Januari-Desember
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN																	
1	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah: 1 Laporan	1	Pemanfaatan EBT kurang optimal	Kurangnya kepedulian dan pengetahuan pengguna EBT terhadap manfaat EBT, serta besarnya biaya pemeliharaan EBT	C	Rendahnya jumlah EBT yang dimanfaatkan	3	2	6	Sedang	Inventarisasi, pendataan fungsi, pengawasan pemanfaatan, dan pemeliharaan rutin EBT sesuai regulasi dan SOP yang berlaku	PPTK Balai PPESDM	Januari-Desember
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN																	
1	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi: 1 Laporan	1	Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tidak sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	Kurangnya kepedulian penyedia dalam pelaksanaan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku	C	Potensi terjadinya pencemaran lingkungan (udara, suara) dan kebakaran	3	3	9	Sedang	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan serta inventarisasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tidak berizin sesuai regulasi dan SOP yang berlaku	PPTK Balai PPESDM	Januari-Desember

BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI																		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																		
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	1	Potensi terjadinya kontaminasi oleh kuman pada saat pengambilan sampel tinja dari truck tangki tinja	kontak dengan air limbah dan sampah di jaringan yang banyak mengandung bibit penyakit	C	petugas menjadi sakit	Penggunaan alat-alat perlindungan keselamatan kerja dan mematuhi SOP yang ada;	3	3	9	Sedang	pengawasan terhadap penggunaan alat pengaman diri dan pengawasan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur kegiatan	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah	Januari-Desember
						2	hasil uji di lab terakreditasi tidak sesuai jadwal	banyaknya orang yang melakukan pengujian kualitas air	C	data yang diperlukan terlambat diperoleh	memperhitungkan pengiriman sampel ke laboratorium terakreditasi sampai dengan hasil uji bisa didapatkan	2	2	4	Rendah	membuat jadwal dan kesepakatan bersama dengan pihak laboratorium	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah	Januari-Desember
						3	Potensi terjadinya kecelakaan dalam uji dilaboratorium	kurang hati hati dalam melakukan pengujian dilaboratorium	C	petugas menjadi sakit	petugas laboratorium harus memahami SOP dalam pengujian bahan di laboratorium serta Penggunaan alat-alat perlindungan keselamatan kerja	3	3	9	Sedang	pengawasan terhadap penggunaan alat pengaman diri dan pengawasan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur kegiatan	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah	Januari-Desember
						4	Potensi kecelakaan kerja;	penggunaan alat alat konstruksi	C	Luka ringan s.d. berat pada pekerja dan masyarakat;	Pelaksanaan prosedur kerja yang benar sesuai dengan SOP;	4	3	12	Tinggi	- Pengawasan K3 pelaksanaan konstruksi;	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah	Mei-Agustus
						5	Pelaksanaan pekerjaan tidak tepat waktu	Butuh waktu dan kecermatan dalam mencocokkan volume lapangan dengan volume kontrak awal	C	Terlambatnya pelaksanaan kontrak	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara bersama untuk review desain kemudian dituangkan dalam RMK dan Addendum kontrak	3	3	9	Sedang	- Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis - rapat koordinasi internal	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah	Mei-Agustus
						6	terjadinya sumbatan pada jaringan pipa air limbah	-adanya sampah yg dibuang di saluran limbah, adanya akar tanaman yang merusak jaringan pipa -pembangunan saluran air limbah yang tidak sesuai dengan perencanaan konstruksi	C	- Air limbah meluap diantaranya di Jl. Kesehatan, kawasan UGM, Jl. Mayor Suryotomo, dll, - Kerusakan pada jaringan di sekitar jalan raya sehingga dapat membahayakan pengguna jalan	> Rutin dilakukan pembersihan saluran pipa air limbah sehingga aliran limbah menjadi lancar > perbaikan jaringan secara cepat dan segera melalui kegiatan swakelola maupun melalui pihak ke 3	3	3	9	Sedang	- Rutin dilakukan pembersihan saluran pipa air limbah sehingga aliran limbah menjadi lancar ' - Perbaikan jaringan secara cepat dan segera melalui kegiatan swakelola maupun pihak ke 3 - Khusus untuk kegiatan swakelola mempersiapkan tim tanggap darurat yang siap 24 jam untuk segera melakukan perbaikan serta mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang terutama jika kerusakan ada	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah	Januari-Desember
						7	Instalasi lumpur tinja kapasitas penampungannya sudah penuh	peningkatan truck tangki tinja dari berbagai daerah	C	pengolahan lumpur tinja tidak optimal	-pengoperasian secara maksimal dengan pembagian shift siang dan malam untuk pengolahan lumpur tinja -melakukan review design terhadap IPLT	3	3	9	Sedang	- Memaksimalkan jadwal untuk operator pengolahan lumpur tinja - Mengoptimalkan hasil review design sebagai dasar untuk melakukan optimalisasi IPLT	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah	Januari-Desember

2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	1	Jumlah data dan informasi jasa konstruksi cakupan provinsi	1	Terbatasnya database, SDM dan sarana prasarana sebagai dasar kebijakan pembinaan jasa konstruksi daerah	Keterbatasan data, SDM, sarana prasarana	C	Kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi	Menyusun database secara berkala	2	2	4	Rendah	Memanfaatkan data dan informasi yang tersedia melalui koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait	Kepala Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi	Januari-Desember				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																						
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen	1	Keterlambatan Pelimpahan UP/TU/GU/LS	Adanya perubahan jadwal pencairan dari BPKA	C	Kurangnya Koordinasi dan Kepastian Jadwal Pembayaran Transfer dari BPKA ke Dinas Induk	Pembuatan jadwal rapat koordinasi berkala	3	3	9	Sedang	Koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terlibat	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember				
						2	Kurangnya Kelengkapan Data Pendukung SPJ Keuangan	Dukungan dari rekanan yang kurang optimal dan lambatnya pelayanan dari pihak ketiga	C	Keterbatasan waktu penyusunan SPJ membuat pihak rekanan hanya memiliki waktu terbatas dalam melengkapi berkas administrasi sehingga menyebabkan keterlambatan SPJ	Pembuatan kelengkapan SPJ lebih awal	3	3	9	Sedang	Pembuatan rencana jadwal belanja barang dan jasa	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember				
						3	Keterlambatan Pembayaran Tagihan Belanja Barang dan Jasa	Adanya penyesuaian metode dan alur pencairan uang dan pembuatan akun baru	C	Adanya peraturan baru terkait alur pembuatan akun perbankan terkait pembayaran belanja barang dan jasa	Koordinasi yang intens dengan pihak Pemda dan Bank	3	3	9	Sedang	Pemantauan proses pembuatan akun dan proses pembayaran	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember				
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Ketidaksesuaian antara DPA dengan RKBM	adanya perubahan APBD atau rasionalisasi Anggaran Belanja	C	Ketidaksesuaian antara data barang serta persediaan barang di DPA dengan di aplikasi RKBM akan menyebabkan pencatatan terganggu	Pengajuan Revisi RKBM	2	2	4	Rendah	Koordinasi antara bagian Program Perencana Anggaran dengan Pemegang Barang	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember				
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Adanya Kerusakan elektikal pada perangkat kelistrikan peralatan kantor	Adanya Force Majeur atau Bencana Alam seperti tersambar petir, penangkal petir rusak, banjir, angin kencang	C	Tidak berfungsinya peralatan penunjang kantor maupun unit operasi pengolahan air limbah dan lumpur tinja	Pemeliharaan Penangkal Petir	3	4	12	Tinggi	Adanya Jadwal pemantauan dan Pemeliharaan Rutin Kelistrikan	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember				
						2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Kurangnya Data dan Informasi Kebutuhan ATK	Banyaknya personil di Balai PALPJK dan keterbatasan anggaran pengadaan ATK, bahan kertas cover serta bahan komputer	C	Kurang optimalnya pelayanan kepada pengguna Jasa Layanan Laboratorium Konstruksi dan Pengolahan Lumpur Tinja akibat keterbatasan sarana peralatan dan perlengkapan kantor	Efisiensi penggunaan ATK, kertas dan Bahan komputer	3	3	9	Sedang	Pembagian ATK, kertas dan Bahan komputer sesuai dengan kebutuhan	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember
										2	Keterlambatan pembayaran Tagihan Belanja ATK	Adanya keterlambatan pelimpahan Dana Transfer dari induk	C	Kurangnya Koordinasi dan Kepastian Jadwal Pembayaran Transfer dari BPKA ke Dinas Induk	Pembuatan jadwal rapat koordinasi berkala	3	3	9	Sedang	Koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terlibat	Kepala Subbagian Tata Usaha	Februari-Maret
						3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Adanya kontaminasi penyakit akibat pekerjaan	Kurangnya pengadaan Sabun Pembersih Tangan sehingga petugas pelayanan akan terdampak kontaminasi penyakit dari pengolahan air limbah maupun lumpur tinja	C	Anggaran yang terbatas dalam pengadaan bahan kimi pembersih	Menggunakan persediaan bahan pembersih yang ada	3	3	9	Sedang	Koordinasi dengan pihak Penyedia Jasa Kebersihan untuk membantu dalam hal penyediaan bahan kimia pembersih	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember
										4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Kurang Optimalnya Pelayanan Jasa Laboratorium Konstruksi	Pengadaan Bahan Cetak mengalami keterlambatan sehingga menghambat pelayanan	C	Kurangnya Koordinasi dan Kepastian Jadwal Pembayaran Transfer dari BPKA ke Dinas Induk	Pembuatan jadwal rapat koordinasi berkala	3	3	9
2	Kurang Optimalnya Pelayanan Truck Tangki Tinja	Penyediaan Cetak Karcis yang mengalami keterlambatan	C	Kurangnya Koordinasi dan Kepastian Jadwal Pembayaran Transfer dari BPKA ke Dinas Induk	Pembuatan jadwal rapat koordinasi berkala	3	3	9	Sedang					Koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terlibat	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember						
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Tidak semua pegawai maupun pengunjung Balai PALPJK mendapatkan informasi dari Surat Kabar Harian	Adanya keterbatasan anggaran dalam penyediaan Surat Kabar	C	Bahan Bacaan yang berfungsi untuk menambah wawasan sangat terbatas dan tidak bisa dinikmati oleh semua pegawai di lingkungan Balai PALPJK	Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui media digital	2	2	4	Rendah	Digitilasi informasi luar dan kegiatan Balai PALPJK melalui media sosial	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember						

	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Ketidapastian penyerapan anggaran perjalanan dinas luar	Jadwal pelaksanaan kunjungan atau undangan dari luar daerah yang tidak bisa diperkirakan	C	Tidak adanya jadwal yang pasti terhadap rencana perjalanan dinas luar daerah	Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi luar daerah dalam rangka mendukung kinerja pelayanan	3	3	9	Sedang	Koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember		
				2	Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak maksimal	Adanya Kendala Permasalahan Lapangan	C	Kurangnya database permasalahan di lapangan yang menyebabkan rencana kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tidak terjadwal dengan baik	Pembuatan database kendala dan permasalahan di lapangan	2	2	4	Rendah	Pengumpulan data dan informasi lapangan	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember			
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Penggunaan materi fisik yang sudah berkurang	Adanya penggunaan e materi yang saat ini dirasa lebih efektif	C	Penyerapan anggaran penyediaan materi yang tidak tercapai	Optimalisasi penggunaan materi fisik	2	2	4	Rendah	Koordinasi dengan pihak yang membutuhkan materi	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember		
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Penyerapan Anggaran Tagihan Listrik yang kurang Optimal	Adanya kerusakan unit peralatan pengolahan air limbah dan lumpur tinja menyebabkan beberapa unit tidak berfungsi sehingga konsumsi daya listrik menurun	C	Kerusakan pada beberapa unit peralatan akan berdampak pada kebutuhan daya listrik yang lebih kecil dibandingkan dengan perencanaan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Unit Perlengkapan dan Peralatan	3	3	9	Sedang	Pembuatan Jadwal Rutin Pemeliharaan Peralatan	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember
						2	Adanya Lonjakan Tagihan Air	Adanya kebocoran pada saluran air bersih untuk utilitas di area perkantoran maupun di lingkungan	C	Kerusakan pipa jaringan air bersih menyebabkan kebocoran sehingga debit penggunaan air bersih mengalami lonjakan yang signifikan	Pematauan rutin terhadap jaringan air bersih dari PDAM	3	3	9	Sedang	Pembuatan Jadwal Rutin Pemeliharaan Jaringan Pipa Air Bersih PDAM	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember	
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Kebersihan dan kerapian area pelayanan air limbah dan laboratorium konstruksi kurang optimal	Besarnya luasan area yang harus dibersihkan sangat besar yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah personil	C	Area pelayanan yang kurang bersih akan mengurangi kenyamanan pengguna layanan	pembersihan secara bertahap oleh jasa kebersihan	3	3	9	Sedang	Koordinasi dengan Penyedia Jasa Kebersihan dan pembuatan jadwal pembersihan rutin dan bertahap	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	1	Pajak kendaraan tidak terbayarkan/terlambat dibayarkan	Kelalaian pemegang kendaraan	C	Denda karena terlambat pembayaran pajak kendaraan	Penjadwalan pembayaran pajak kendaraan agar selalu tepat waktu	3	3	9	Sedang	Koordinasi dengan pemegang kendaraan serta penjadwalan pembayaran pajak kendaraan agar selalu tepat waktu	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember		
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Belum optimalnya pemeliharaan dan mesin lainnya	1. Keterlambatan Pemeliharaan 2. Kurangnya koordinasi dengan bidang terkait peralatan kantor dan mesin yang sudah waktunya dilakukan pemeliharaan	C	1. Peralatan kantor yang digunakan menjadi kurang maksimal dan menghambat kinerja	Koordinasi dan penjadwalan agar pemeliharaan peralatan kantor tidak terlambat	3	3	9	Sedang	Identifikasi unit mesin yang prioritas membutuhkan pemeliharaan	Kepala Subbagian Tata Usaha	Januari-Desember
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Ketidaknyamanan kondisi ruangan kerja	Kurangnya ruangan kerja yang nyaman dan kondusif di Balai PALPK	C	Bertambahnya personil pegawai Balai PALPK tidak diimbangi dengan penambahan ruangan kerja yang nyaman sehingga menyebabkan kinerja pegawai menurun	Pembuatan ruangan kerja sementara dengan memanfaatkan ruangan yang ada	3	3	9	Sedang	Perencanaan penambahan ruangan kerja baru	Kepala Subbagian Tata Usaha	Juni, Agustus, September



**PENILAIAN RISIKO KECURANGAN / FRAUD RISK ASSESSMENT (FRA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Aspek/Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak terkait	Jenis Resiko Kecurangan	Pemilik Resiko	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Uraian Dampak	Risiko saat ini (<i>Current Risk</i>)			Respon Terhadap Risiko Kecurangan	
										Pengendalian Existing				Skor <i>likelihood</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			15	
										12	13	14		
A	Urusan PUPKP & ESDM	1. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan	Penyedia Jasa memberikan gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan antara lain : Penggunaan bahan dan pembuatan ukuran tidak sesuai dengan spesifikasi dan gambar rencana.	Penyedia jasa, PPK, PPTK	Penyuapan	Kepala Dinas PUPESDM DIY	1. Lemahnya Integritas Pihak Terkait 2. kurang maksimalnya pengawasan oleh PPKom, Tim Teknis, dan Konsultan pengawas 3. Lemahnya partisipasi pengawasan oleh masyarakat dan pihak terkait	Pemakluman terhadap hasil pekerjaan	1. penurunan spesifikasi, karena sudah diberikan gratifikasi 2. Kerugian Negara 3. Menurunnya reputasi organisasi 4. adanya penurunan kualitas bangunan (Fisik Konstruksi) yang menyebabkan umur bangunan tidak lama	1. Penandatanganan Pakta Integritas 2. Layanan pengaduan 3. Pengawasan secara rutin 4. uji Lab bahan sebelum pelaksanaan pekerjaan 5. Teguran secara tertulis 6. dilakukan rapat koordinasi secara berkala	2	4	8	Mengoptimalkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengujian bahan dan struktur di Lab yang terpercaya Menerapkan teknologi fabrikasi untuk meminimalisir spek bangunan yang rendah.
		2. Paket Pengadaan menghindari tender	HPS Pekerjaan sejenis dibuat dibawah nilai tender	PPK, PPTK	1. Menghindari tender 2. Kolusi	Kepala Dinas PUPESDM DIY	Lemahnya penganggaran dalam penentuan paket pekerjaan	Banyak paket pengadaan langsung dengan nilai HPS mendekati nilai tender	1. Kerugian Negara akibat pemborosan 2. kesulitan dalam pemantauan pelaksanaan pekerjaan	1. Reviu usulan pemaketan pekerjaan oleh PA/KPA	3	3	9	Mengoptimalkan pengawasan melekat agar pelaku usaha tidak bisa berinteraksi langsung dengan PPK
		3. Memanipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa	Laporan Progress pekerjaan tidak sesuai realisasi di lapangan dengan penambahan prosentase hasil pekerjaan.	PPK, PPTK, penyedia jasa	kecurangan dalam penyusunan laporan progres pekerjaan	Kepala Dinas PUPESDM DIY	Adanya tuntutan nilai minimal progres pekerjaan yang harus di capai oleh penyedia jasa. Terkait dengan syarat penagihan pembayaran.	Hasil pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan laporan progres pekerjaan	Kerugian negara akibat mengeluarkan uang untuk progres pekerjaan yang tidak sesuai	1. Reviu Tim Teknis Pekerjaan 2. <i>Back up</i> Penagihan	3	3	9	1. Monitoring oleh PPK 2. Rapat Progress secara rutin dengan tim teknis di lapangan 3. Dilakukan detail perencanaan pekerjaan untuk mencapai Target minimal progres untuk syarat penagihan dan penyiapan perencanaan sedari awal
		4. Penerbitan Rekomendasi Teknis Sub urusan air tanah dan geologi sesuai permintaan pemohon/ pihak tertentu	Tidak dilakukan pengecekan dokumen pendukung dalam penerbitan Rekomendasi Teknis	Pemohon, Dppm, Bidang ESDM	Eksplotasi air tanah melebihi ambang batas	Kepala Dinas PUPESDM DIY	1. Kurangnya pengawasan internal 2. SOP tidak dilaksanakan	Penurunan muka air tanah lebih dari 20%	1. Kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pengambilan air tanah yang berlebih 2. Turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya Air Tanah yang berkelanjutan 3. Menyebabkan kekurangan air tanah bagi warga di sekitar tempat kegiatan usaha	1. Forum konsultasi publik 2. SOP dan Standar Pelayanan Dinas PUPESDM DIY 3. Reviu berjenjang internal dinas dalam penerbitan Rekomendasi Teknis	2	4	8	1. Pelaksanaan pelayanan pemberian Rekomendasi Teknis yang sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan. 2. Pelaksanaan reviu berjenjang internal dinas dari staf hingga Kepala Dinas. 3. Pembuatan ringkasan perhitungan Rekomendasi Teknis untuk kemudahan reviu berjenjang 4. Pelaksanaan audiensi dengan pelaku usaha/ pemrakarsa dan Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM
		5. Penghitungan NPA yang digunakan sebagai dasar penentuan besaran Pajak Air Tanah dikurangi	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah tidak mengacu : 1. cara perhitungan yang diamanatkan dalam Pergub DIY No 73 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah 2. pencatatan volume perusahaan Air Tanah yang terbaca pada Water Meter Pelaku Usaha atau perhitungan volume yang diamanatkan dalam Pergub DIY No 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah 3. Data HAB yang ditetapkan dengan Kepgub DIY No 102 Tahun 2021 tentang Penetapan HAB untuk Air Tanah Th 2021	Wajib pajak, BPKAD kabupaten/kota, Bidang ESDM	Nilai NPA lebih rendah dari nilai ekonomi air tanah	Kepala Dinas PUPESDM DIY	1. Peerhitungan NPA tidak sesuai Pergub DIY No 73 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah 2. lemahnya pengawasan atasan	tarif pajak air tanah rendah	1. Turunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam penetapan Retribusi Pajak Air Tanah 2. Turunnya PAD Kabupaten/ Kota	1. Rekonsiliasi berkala data volume perusahaan Air Tanah dan hasil penetapan NPA dengan BKAD Kab/ Kota 2. Rekonsiliasi dengan BP3ESDM mengenai pencatatan/ penghitungan data volume perusahaan Air Tanah 3. Reviu berjenjang internal dinas dalam penetapan NPA	2	4	8	1. Pelaksanaan reviu berjenjang internal dinas dari staf hingga Kepala Dinas 2. Pelaksanaan rekonsiliasi data bersama BKAD Kab/ Kota maupun dengan BP3ESDM selaku pihak yang mencatat/ menghitung volume perusahaan Air Tanah. 3. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku perusahaan Air Tanah untuk memasang <i>water meter</i> di posisi yang tepat untuk meningkatkan keakuratan volume Air Tanah yang tercatat. 4. Rencana pembuatan media berupa software alat bantu/ kalkulator penghitungan NPA untuk meminimalisasi resiko kesalahan penghitungan dan efisiensi waktu pengerjaan

No	Aspek/Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak terkait	Jenis Resiko Kecurangan	Pemilik Resiko	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Uraian Dampak	Risiko saat ini (Current Risk)			Respon Terhadap Risiko Kecurangan			
										Pengendalian Existing				Skor likelihood	Skor Dampak	Skor Dampak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15
B	Transaksi Pendapatan	6 Penggelapan dana penerimaan retribusi	Penggelapan atas Penerimaan Retribusi dan atau Pajak yang dipungut atau di terima	Pengguna jasa, petugas pelayanan	Penggelapan atas Penerimaan Retribusi dan atau Pajak yang dipungut atau di terima	Kepala Dinas PUPESDM DIY dan Pemda DIY	Lemahnya pengawasan terhadap penerimaan dan penyetoran retribusi ke negara.	target pendapatan tidak tercapai	Kerugian keuangan negara, Insentif tidak dapat dicairkan karena target pendapatan tidak tercapai	Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses penerimaan dan penyetoran Retribusi, Penggunaan QRIS sebagai media pembayaran, Pemasangan CCTV	2	2	4	a). memberikan pengawasan yang ketat kepada petugas pemungut pajak dan retribusi b). memberikan sanksi yang tegas kepada petugas yang menerima suap		
C	Transaksi Pengeluaran	7 Pembayaran tidak sah	1.Membuat bukti pengeluaran fiktif yang ditagihkan kepada unit kerja 2. Memalsukan bukti yang dijadikan dasar tagihan dengan cara mengubah tanggal bukti yang sudah pernah ditagihkan ke unit kerja (pemeliharaan aset) 3. Memalsukan bukti yang dijadikan dasar tagihan dengan cara mengubah jumlah tagihan.	1. Kasub Bag Keuangan; 2. Kasubag Umum; 3. Bendahara Pengeluaran	Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset)	Kepala Dinas PUPESDM DIY	Kurangnya pelatihan internal tentang penatausahaan keuangan kepada semua personil di Kelompok Substansi Keuangan	Pengambilan uang dilakukan tanpa melibatkan orang lain (misal bendahara)	Kerugian negara/daerah	1. Terdapat pemisahan fungsi masing-masing pegawai terkait transaksi pengeluaran pada Kelompok Substansi Keuangan, yaitu terdapat Pembantu Penatausahaan Keuangan yang terdiri dari verifikator keuangan dan pembuat laporan akuntansi, Bendahara pengeluaran yang dibantu oleh pengadministrasi keuangan dan pengelola Cash Management System (CMS). Selain itu, pada setiap sub bagian terdapat PUMK yang bertugas mengajukan kebutuhan dana kepada bendahara pengeluaran berdasarkan DPA/anggaran kas; 2. Verifikasi bukti telah dilakukan oleh masing-masing fungsi namun belum terdapat mekanisme sampling terhadap bukti-bukti mencurigakan untuk dilakukan konfirmasi; 3. Terdapat mekanisme penghitungan kembali rincian pengeluaran dengan jumlah total pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebelum melakukan pembayaran. Bendahara pengeluaran menggunakan aplikasi SIPD sebagai kendali keuangan yang didukung dengan kertas kerja untuk memastikan bahwa total pengeluaran sama dengan anggaran kasnya; 4. Bendahara dan pengelola gaji telah mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPKA D.I. Yogyakarta untuk namun verifikasi dan pembantu bendahara belum mendapatkan	1	4	4	Memberikan pelatihan internal tentang penatausahaan keuangan kepada semua personil di Kelompok Substansi Keuangan, khususnya yang bertugas sebagai verifikator dan Pembantu Bendahara		
		8 Pengambilan uang secara tidak sah	1. Pemalsuan spesimen tanda tangan pada cek 2. Sengaja mengubah nomor rekening tujuan transfer ke rekening pribadi.	1. Kasub Bag Keuangan; 2. Kasubag Umum; 3. Bendahara Pengeluaran	Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset)	Kepala Dinas PUPESDM DIY	Buku kendali atas transaksi pengeluaran belum atas persetujuan Kasubkor Keuangan	Pengambilan uang dilakukan tanpa melibatkan orang lain (misal bendahara)	Kerugian negara/daerah	1. Penggunaan cek atas nama bukan atas cek unjukan; 2. Penggunaan Pre-number cek; 3. Terdapat buku kendali dalam bentuk excel untuk mencatat setiap nomor transaksi, nilai transaksi dan tujuan pembayaran atas transaksi yang ditandatangani namun tanpa persetujuan Kasubkor Keuangan; 4. Telah dilakukan verifikasi pada saat pengajuan SPJ antara nomor rekening tujuan dengan nomor yang tercantum dalam tagihan; 5. Telah dilakukan rekonsiliasi bank secara periodik oleh bendahara setiap bulan.	1	4	4	Menginstruksikan Kasubkor Keuangan untuk melakukan monitoring atas setiap nomor transaksi, nilai transaksi dan tujuan pembayaran atas transaksi.		

No	Aspek/Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak terkait	Jenis Resiko Kecurangan	Pemilik Resiko	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Uraian Dampak	Risiko saat ini (Current Risk)			Respon Terhadap Risiko Kecurangan	
										Pengendalian Existing				Skor likelihood
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			15	
		9 Pembayaran gaji/TPP kepada pegawai yang lebih besar dari yang seharusnya	1. Tidak melakukan pemotongan terhadap gaji/TPP yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (misalnya naik jabatan, status anak kuliah karena tidak ada update data, pensiun, mutasi) 2. Manipulasi daftar hadir manual dan atau data rekap kehadiran pegawai sebagai dasar penghitungan gaji/TPP	1. Kasub Bag Keuangan; 2. Kasub Bag Umum 3. Bendahara Pengeluaran	Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset)	Kepala Dinas PUPESDM DIY	Belum dilakukan verifikasi terhadap rekapitulasi daftar hadir melalui e-PRIMA dengan daftar hadir manual	Pegawai jarang berada di kantor dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Kerugian keuangan negara/daerah	Adanya pemisahan tugas antara pembuat daftar gaji/TPP, yaitu oleh pengelola/pengadministrasi gaji dengan petugas pengadministrasi kepegawaian yang melakukan pembaharuan data dasar pembayaran gaji/TPP; 3. Secara periodik dilakukan rekonsiliasi antara jumlah pegawai dalam Daftar Gaji/TPP dengan jumlah pegawai aktif	1	4	4	1. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas perubahan data dasar pembayaran gaji/TPP dengan Bagian Kasda BPKA D.I. Yogyakarta yang didukung dengan SK terkait; 2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-PRIMA sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP); 3. Melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi daftar hadir melalui e-PRIMA dengan daftar hadir manual
D	Pengadaan Barang dan Jasa	10 Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan	Barang yang diusulkan sebenarnya tidak dibutuhkan namun diusulkan pengadaannya karena menguntungkan secara pribadi dan atau golongan. Sedangkan usulan yang dibuat hanya formalitas untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen.	PA, PPK, PPTK	Korupsi (benturan kepentingan/Conflict of Interest)	1. Bidang/Balai/ Subbagian pengusul 2. Pengurus Barang	1. Lemahnya peran pengawasan internal dalam perencanaan pengadaan 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	Jenis Barang yang diusulkan berulang, jumlahnya cukup banyak dan pengadaannya dilakukan pada penyedia barang tertentu saja.	Kerugian keuangan negara	1. Perencanaan pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	2	4	8	1. Menguatkan peran pengawasan internal melalui reviu atas perencanaan pengadaan untuk pencegahan kecurangan perencanaan PBJ; 2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa; 3. Penandatanganan pakta integritas bagi pihak yang terkait dalam perencanaan pengadaan aset an persediaan
		11 Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up)	Anggaran PBJ dan atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun tidak dilakukan secara keahlian antara lain dengan tidak melakukan survey harga pasar dan tanpa disertai data pendukung (backup) data harga yang jelas	Pengurus Barang/Bidang/Balai/ Subbagian pengusul	Korupsi (benturan kepentingan/Conflict of Interest)	PA/KPA, PPK, PPTK	Lemahnya peran pengawasan internal dalam penganggaran pengadaan untuk mencegah kecurangan (fraud) penganggaran PBJ.	Penyusunan anggaran atau HPS tidak dilakukan secara keahlian, dengan melakukan survei harga pasar.	Kerugian keuangan negara	1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang antara lain mengatur: a) Pengadaan barang dan jasa memperhatikan prinsip efektif dan efisien; b) HPS disusun secara keahlian.	2	5	10	1. Menguatkan peran pengawasan internal melalui reviu atas proses penganggaran pengadaan untuk mencegah kecurangan penganggaran PBJ; 2. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak yang terkait dalam penganggaran dan penyusunan HPS PBJ; 3. Melakukan reviu/pengawasan proses penganggaran dan penyusunan HPS pengadaan barang dan jasa secara intern
		12 Risiko pengadaan fiktif	a) Dilakukannya manipulasi/pemalsuan dokumen atas pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian, dan atau Surat Pesanan, antara lain: Berita acara pemeriksaan barang, berita acara penerimaan barang dan berita acara serah terima barang yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% namun sebenarnya pekerjaan tidak/belum dilaksanakan. b) Dilakukannya manipulasi/pemalsuan bukti pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan bukti pembelian/ pembayaran	Bendahara Pengeluaran, dan pengurus Barang.	Penyimpangan aset (Asset Misappropriation)/kecurangan pengeluaran (pengeluaran fiktif)	PPK/PPTK dan Pejabat Pengadaan	Lemahnya Pengawasan Internal dalam pemeriksaan hasil pekerjaan PBJ	Tim pemeriksa dan penerima barang tidak memiliki kompetensi/ pengetahuan atas barang yang diadakan.	Kerugian keuangan negara	1. Terdapat Tim Pendukung/Tim Teknis PPK/PPTK dalam melakukan penerimaan dan pemeriksaan barang; 2. Terdapat petugas gudang/penyimpan barang; 3. Barang yang diterima dan dikeluarkan/ digunakan telah diadministrasikan; 4. Terdapat kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagai dasar pembayaran, yaitu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan kuitansi pembayaran	1	5	5	1. Menguatkan peran pengawasan internal melalui reviu atas pemeriksaan hasil pekerjaan PBJ; 2. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak yang terkait dalam proses penerimaan dan pemeriksaan PBJ; 3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko kecurangan PBJ secara komprehensif dan menetapkan rencana pengendaliannya

No	Aspek/Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak terkait	Jenis Resiko Kecurangan	Pemilik Resiko	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Uraian Dampak	Risiko saat ini (Current Risk)			Respon Terhadap Risiko Kecurangan	
										Pengendalian Existing				Skor likelihood
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			15	
		13 PA/KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	Calon rekanan memberikan gratifikasi/ suap dengan maksud agar dimenangkan atau ditunjuk pada proses PBJ, atau rekanan memberikan gratifikasi/ suap sebagai ungkapan rasa terima kasih karena sering ditunjuk/dimenangkan dalam proses PBJ, dan berharap selalu ditunjuk sebagai rekanan mitra.	Rekanan	Korupsi (Gratifikasi)	- PA/KPA - PPK, PPTK - Pejabat Pengadaan	1. Lemahnya Pengawasan Internal dalam pemeriksaan hasil pekerjaan PBJ; 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	Terdapat kelemahan dan penyimpangan pada proses Pengadaan barang dan Jasa	Kerugian keuangan negara	1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi; 2. SK Gubernur Nomor 40/TLI.2019 Tentang Pembentukan Komite Pengendalian Gratifikasi dan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Daerah DIY Tgl. 01 Februari 2019	2	5	10	1. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi, antara lain dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan serta pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas PUPESDM DIY
E	Sumber Daya Manusia (SDM)	14 Suap/ gratifikasi dalam proses pengurusan berkas kepegawaian	Terdapat suap/ gratifikasi dalam proses mempercepat/ memperlancar proses pengurusan berkas kepegawaian antara lain: Pembuatan gaji berkala, Kenaikan pangkat, Pengurusan pensiun pegawai, Penilaian SKP, Usulan Pengembangan dan Pembinaan SDM, Penilaian angka kredit	Pegawai terkait yang berkas kepegawaiannya dalam proses pengurusan	Korupsi (Suap/Gratifikasi)	Kasubag Umum	1. Lemahnya peran pengawasan internal dalam pengelolaan data kepegawaian 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	Urusan Kepegawaian hanya ditangani seorang pegawai/pegawai tertentu saja dan tidak dilakukan rotasi secara berkala	Menurunnya reputasi Dinas	Keputusan Kepala Dinas PUPESDM DIY Nomor 188/01591 Tanggal 14 Januari 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal di Lingkungan DPUPESDM DIY, yang mencakup: a) SOP tentang Pengelolaan Data Kepegawaian Nomor 065/02169 tanggal 20 Januari 2022 b). SOP tentang Penyiapan Bahan Perencanaan Kebutuhan Pegawai Nomor 065/02170 tanggal 20 Januari 2022 c). SOP tentang Penyiapan Bahan dan Pemberhentian Pegawai Nomor 065/02171 tanggal 20 Januari 2022 d). SOP tentang Penyiapan Bahan Usulan Pengurusan Taspen Penilaian SKP, Usulan Pengembangan dan Pembinaan SDM e). SOP tentang Penyiapan Daftar Penilaian Kinerja pegawai Nomor 065/02175 tanggal 20 Januari 2022 f). SOP tentang Penilaian SKP, Usulan Pengembangan dan Pembinaan SDM Nomor 065/02176 tanggal 20 Januari 2022 g). SOP tentang Penyiapan Bahan Usulan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala Nomor 065/02179 tanggal 20 Januari 2022	2	4	8	1. Memperkuat peran pengawasan internal dengan melakukan digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan data kepegawaian; 2. Melakukan reviu/pengawasan intern atas pengelolaan data kepegawaian; 3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait pengelolaan data kepegawaian;
F	Aset dan Persediaan	15 Perencanaan pengadaan Aset dan Persediaan tidak sesuai kebutuhan	Barang yang diusulkan sebenarnya tidak dibutuhkan namun diusulkan pengadaannya karena menguntungkan secara pribadi dan atau golongan.	Pengurus Barang ;	Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset)	Bidang/Balai/ Subbagian pengusul	1. Lemahnya peran pengawasan internal dalam perencanaan pengadaan aset 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	Jenis Barang yang diusulkan berulang, jumlahnya cukup banyak dan pengadaannya dilakukan pada penyedia barang tertentu saja.	1. Menurunnya kinerja OPD 2. Kerugian keuangan negara	1. Menyampaikan informasi akan kebutuhan barang untuk diusulkan kepada masing-masing bidang/balai/sub bagian; 2. Memeriksa kondisi fisik barang atau inventaris yang layak diganti atau diperbaiki oleh masing-masing bidang/balai dan sub bagian serta rencana kebutuhan barang tahun mendatang dalam rangka tuntutan kerja; 3. Membuat rekapitulasi atas usulan masing-masing bidang/balai/sub bagian	2	4	8	1. Memperkuat peran pengawasan internal melalui kegiatan reviu atas perencanaan pengadaan untuk pencegahan kecurangan perencanaan PBJ secara intern; 2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait perencanaan pengadaan barang dan jasa; 3. Membentuk tim pencegahan kecurangan perencanaan pengadaan aset dan persediaan
		16 Penggunaan aset dan persediaan OPD secara tidak sah untuk kepentingan pribadi pegawai/pejabat OPD	a) Penggunaan Bahan Habis Pakai (ATK, bensin) untuk kepentingan pribadi. b) Aset digunakan untuk kepentingan pribadi dan biaya operasionalnya dibebankan kepada OPD.	Kasubag Umum	Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset)	Pengurus Barang, Pejabat/Pegawai OPD yang memperoleh pinjaman aset	Tidak terdapat mekanisme yang memuat larangan aset digunakan untuk kepentingan pribadi beserta sanksinya	Tidak ada pertanggungjawaban penggunaan Bahan Habis Pakai oleh masing-masing personil (penggunaan bon bensin) dan Bidang/Balai/Subbagian	1. Kerugian negara 2. Menurunnya kinerja pengawasan	Terdapat surat penunjukan pemegang barang yang bertanggung jawab terhadap masing-masing aset	3	4	12	Adanya jaminan yang mengikat dan larangan aset digunakan untuk kepentingan pribadi beserta sanksinya

No	Aspek/Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak terkait	Jenis Resiko Kecurangan	Pemilik Resiko	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Uraian Dampak	Risiko saat ini (Current Risk)			Respon Terhadap Risiko Kecurangan	
										Pengendalian Existing				Skor likelihood
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			15	
		17 Penyalahgunaan/ penggelapan aset OPD	a) Penyalahgunaan/ penggelapan aset dengan cara tidak dikembalikannya aset/barang inventaris yang dipinjamkan kepada pejabat/ pegawai. b) Penjualan/penguasaan aset DPUPESDM DIY oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. c) Penghapusan aset DPUPESDM DIY yang tidak sesuai ketentuan untuk menghilangkan jejak aset yang dicuri/hilang.	Kasubag Umum	Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset)	Pengurus Barang, Pejabat/Pegawai OPD yang memperoleh pinjaman aset	1. SOP terkait pinjaman aset belum mengatur prosedur pengembalian barang inventaris yang dipinjam 2. Belum melakukan pemutakhiran Kartu Inventaris Ruang (KIR) secara berkala	Tidak terdapat SOP pengembalian barang inventaris yang dipinjam	1. Kerugian negara 2. Menurunnya kinerja pengawasan	1) Menyusun dan mengkompilasi data BMD yang ada dalam penguasaan pengguna anggaran; 2) Menyampaikan informasi dan pengecekan langsung kepada semua bidang dan subbagian untuk membuat daftar barang yang rusak berat; 3) Mengkompilasi daftar BMD yang akan dihapus terutama yang sudah tidak digunakan lagi; 4) Mengklarifikasi dan menilai daftar BMD tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala melalui Kasubag atas usulan penghapusan; 5) Memberikan penilaian atas usulan penghapusan barang. Jika usulan BMD benar adanya akan disetujui dan diberi tandatangan. Jika tidak akan ditunda dan disimpan kembali. 6) Mengirimkan usulan penghapusan BMD yang telah disetujui yang memiliki Tusi Pengelolaan Aset selaku pembantu pengelola BMD. 7) Mendampingi tim penghapusan BMD dan menerima surat penetapan penghapusan. 8). Menyampaikan surat penetapan penghapusan BMD kepada Inspektur untuk diketahui. 9) Melakukan perubahan KIR, KIB dan buku inventaris barang atas implikasi penghapusan barang. 10) Menyimpan surat penetapan penghapusan sebagai arsip.	3	5	15	* Menguatkan peran pengawasan internal * Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan fraud kepada pegawai * Melakukan proses verifikasi secara cermat dan teliti atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang dilengkapi dengan laporan/notulen
G	Teknologi Informasi	18 Penyalahgunaan data Dinas PUPESDM DIY, yaitu, Klinik Konstruksi, Kang Jogja, Layanan Berbasis Online Tracing (LABORA), SISDA (Sumber Daya Air), SILAPOP (Operasi dan Pemeliharaan Irigasi), AKNPI (Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi), Go Hidro (Realtime Pos Duga Air, Hidrologi), AKNOP (Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan) Embung, SI Air Tanah, SIPGELIS (Ketenagalistrikan), SIPBANG (Pertambangan), SIPATA (Air Tanah)	1. Akses ke sistem dan data secara tidak sah 2. Penggunaan data informasi pada Sistem Informasi / aplikasi tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang 3. Transaksi-transaksi yang dimasukkan ke dalam sistem adalah transaksi tidak sah, tidak akurat, dan tidak lengkap. 4. Penyalahgunaan kewenangan oleh manajemen, yaitu: Manajemen menggunakan fasilitas melebihi yang ditetapkan di unit kerja.	1. Sekretaris, Kasubbag Umum, Perencana Muda beserta staf/operator 2. Kabalai PALPJK 3. Kabid SDAD 4. Kabid ESDM serta Kabalai P2ESDM	Penyalahgunaan TI	1. Sekretaris, Kasubbag Umum, Perencana Muda beserta staf/operator 2. Kabalai PALPJK 3. Kabid SDAD 4. Kabid ESDM serta Kabalai P2ESDM	SOP sistem informasi belum memuat mekanisme pemberian dan pengendalian password, pengamanan pemberian akses ke pegawai, dan sanksi bagi para pelanggar	Kesalahan Pengisian konten website resmi SKPD (Konten yang di upload tidak seharusnya dipublikasikan pada website, termasuk kedalam DIK, Daftar Informasi yang dikecualikan) Data yang tercantum di website resmi SKPD tidak Update Database Sistem informasi atau aplikasi dimungkinkan hilang dan bocor serta disusupi data ilegal (judi online, penipuan, hacker, dll) Sistem Informasi belum sesuai dengan rekomendasi Dinas Kominfo DIY	1. Reputasi organisasi menurun jika terbukti terjadi penyalahgunaan informasi data pemeriksaan 2. Terdapat data yang seharusnya tidak dipublikasikan (dikecualikan) di tampilan di website/aplikasi 3. Data bocor ke pihak yang tidak bertanggungjawab (disalahgunakan) dan data tidak dapat dipulihkan kembali sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pegawai maupun masyarakat.	1. Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemda DIY 2. Terdapat fitur captcha untuk meningkatkan keamanan dan user activity log (riwayat aktivitas pengguna) untuk mengetahui riwayat akun yang melakukan log in ke dalam aplikasi; 3. Pembatasan hak akses/otorisasi bagi auditor aplikasi Sistem Informasi 4. Terdapat backup arsip data secara rutin 5. Terdapat kerja sama dengan Dinas Kominfo D.I. Yogyakarta terkait Rekomendasi SPBE melalui sistem aplikasi Peladen.	2	3	6	1. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo D.I. Yogyakarta; 2. Menyempurnakan SOP sistem informasi dengan memuat pengelolaan termasuk mekanisme pemberian dan pengendalian password, pengamanan pemberian akses ke pegawai, dan sanksi bagi para pelanggar
H	Sistem Komunikasi dan Pelaporan	19 Kecurangan (Fraud) dalam penyusunan laporan keuangan.	Rekayasa laporan keuangan dengan melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan, agar dapat menyajikan lebih tinggi (overstated) atau lebih rendah (understated) belanja/ pengeluaran, pendapatan, aset, dan kewajiban untuk tujuan tertentu.	Sekretaris	Kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan (Fraudulent Statement)	Kepala Subbagian Keuangan	1. Lemahnya peran pengawasan internal dalam penyusunan laporan keuangan 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	Urusan Keuangan hanya ditangani seorang pegawai/ pegawai tertentu saja dan tidak dilakukan rotasi secara berkala.	Reputasi organisasi menurun jika terbukti terjadi kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan Keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke BPKA Kurangnya keakuratan data Laporan Keuangan Akhir Tahun	1. Koordinasi internal 2. Penggunaan Aplikasi	2	5	10	1. Menguatkan peran pengawasan internal dengan melakukan penyusunan laporan keuangan secara terintegrasi dengan menggunakan aplikasi; 2. Melakukan reviu/pengawasan intern atas laporan keuangan yang disusun oleh subbag keuangan; 3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait penyusunan laporan keuangan

No	Aspek/Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak terkait	Jenis Resiko Kecurangan	Pemilik Resiko	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Uraian Dampak	Risiko saat ini (Current Risk)			Respon Terhadap Risiko Kecurangan	
										Pengendalian Existing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Skor Likelihood 12	Skor Dampak 13	Skor Dampak 14	15
		20 Manipulasi data laporan kinerja	Rekayasa laporan keuangan dengan melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan capaian kinerja atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan kinerja, agar dapat menyajikan lebih tinggi (overstated) atau lebih rendah (understated) data capaian kinerja untuk tujuan tertentu.	Sekretaris, perencana program anggaran dan pelaporan	Kecurangan dalam penyusunan laporan inerja (Fraudulent Statement)	Sekretaris	1. Lemahnya peran pengawasan internal dalam penyusunan laporan kinerja 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	perhitungan capaian tidak sesuai dengan realisasi fisik dilapangan	data perencanaan untuk tahun selanjutnya tidak valid Kerugian negara karena adanya pergeseran yang menyebabkan pemborosan atau kegiatan prioritas lain tidak tercapai	1. Verifikasi RKA oleh TAPD 2. Reviu RKA SKPD oleh Inspektorat Daerah 3. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD oleh TAPD 4. Penggunaan aplikasi SIPD dalam penganggaran	1	4	4	1. Menerapkan sistem berbasis teknologi informasi terintegrasi untuk pengendalian, administrasi dalam perencanaan dan penganggaran APBD yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi perencanaan dan sosialisasi e-budgeting kepada setiap level user; 2. BKAD mengirimkan atensi kepada inspektorat terhadap program-program dengan risiko tinggi yang diusulkan oleh PD. 3. Meningkatkan reviu penyusunan RKA SKPD oleh Inspektorat dengan penekanan pada reviu rincian belanja



 KEPALA,

 ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.
 NIP. 19710624199032002

MATRIKS RISIKO FINAL SPBE
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY
TAHUN 2025

Nomor :

B/700.1/630/D8

Formulir 2.1 Informasi Umum

Formulir 2.3 Struktur

Tabel 3.1 Identifikasi

Formulir 3.0-1 Identifikasi Risiko SPBE

Formulir 3.0-2 Analisa Risiko SPBE

Formulir 3.0-3 Evaluasi Risiko

Formulir 4.0 Rencana Penanganan Risiko

Lihat Halaman 30 Kementrian PAN & RB no 5 tahun 2020

Informasi Umum Terkait KMR/UKR/UPR SPBE	Struktur Pelaksana Manajemen Risiko	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Sistem/ Penilaian/ Hasil Audit	Sub Sistem/Sub Penilaian/ Sub Hasil Audit	Identifikasi Risiko SPBE						Analisa Risiko SPBE				Evaluasi Risiko SPBE			Rencana Penanganan Risiko				Risiko residual	Pemantauan Risiko			
							Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE	Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE	Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE			Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab
														Level	Penjelasan	Level	Penjelasan											
Nama UPR SPBE	Dinas PUPESDM DIY	Pemilik Resiko SPBE	Kepala Dinas	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang berbasis elektronik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik	Dukungan Pelaksanaan an Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Identifikasi Risiko SPBE						Analisa Risiko SPBE				Evaluasi Risiko SPBE			Rencana Penanganan Risiko								
							Negatif	Kesalahan Pengisian konten website resmi SKPD (Konten yang di upload tidak seharusnya dipublikasikan pada website)	Belum ada prosedur baku terkait pengisian konten website resmi SKPD	Keamanan SPBE	Terdapat data yang tidak dipublikasikan di tampilan di website	Reputasi	Admin website hanya pada personel tertentu dan memohon persetujuan kepada sekretaris sebelum upload konten pada website namun belum ada SOP yang memadai	2	Presentase kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun $5\% < X \leq 10\%$	1	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) ≤ 10	2	Sangat Rendah	Tidak	4	Mitigasi	Melakukan sosialisasi kepada stakeholder, masyarakat atau kelompok informasi masyarakat.	Forum Konsultasi Publik	Triwulan 1 Tahun 2025	Sekretaris Dinas Kepala Subbag Umum	Tidak Ada	Pemantauan Triwulanan
Tugas UPR SPBE	Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada unit kerja	Koordinator Resiko SPBE	Sekretaris Dinas					Data yang di ada pada website resmi SKPD tidak Update	Belum ada rencana terjadwal terkait updating data pada website	Data dan Informasi	Adanya informasi yang sudah tidak terpakai namun belum diperbarui	Reputasi dan kinerja	validasi keakuratan data informasi	1	Presentase kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun Hampir Tidak Terjadi (< 2 Kali)	4	Pemberitaan negatif di media massa lokal dan media sosial yang sesuai fakta dan Penurunan Kinerja 60% s.d 80%	8	Rendah	Tidak	2	Mitigasi	Melaksanakan pengelolaan layanan informasi, pengumpulan kebutuhan serta validasi data untuk menjamin keakuratan data informasi (walidata pendukung satu data pembangunan daerah)	Laporan	Triwulan 4 Tahun 2025	Sekretaris Dinas	Tidak Ada	Pemantauan Triwulanan
Fungsi UPR SPBE	a. penyusunan dan penetapan penilaian Risiko SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE termasuk rencana kontinjensi penanganan Risiko SPBE b. pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan	Pengelola Resiko SPBE	Kepala Sub Bagian Umum Perencana Muda Pranata Komputer Ahli Pertama					Data base Sistem informasi atau aplikasi dimungkinkan hilang dan bocor serta disusupi data ilegal (judi online, penipuan, dll)	adanya pihak yang mengenskripsi atau mensusupi data (hacker) pada sistem informasi atau aplikasi	Keamanan SPBE	Database Sistem informasi atau aplikasi hilang dan bocor serta disusupi data ilegal (judi online, penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dll)	Reputasi dan kinerja	1. Maintenance aplikasi (server dan database) dan pengamanan password secara berkala 2. Menghapus file laman penyusup, kemudian menghapus file file yang tidak diperlukan untuk berjalannya website, kemudian melakukan sanitasi input serta pembatasan file upload 3. Mengganti sistem secara keseluruhan jika sistem yang sekarang dipakai sudah lama tidak dilakukan update dan pemeliharaan.	4	Frekuensi kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun, Sering Terjadi, $4 \leq X \leq 5$ kali	2	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) 10 s.d 20 dan Persentase Implementasi Kepatuhan/Keseuaian Dokumen yang dimiliki Terhadap Regulasi SPBE 80% - 90%	12	Sedang	Ya	1	Mitigasi	1. Melaksanakan maintenance dan backup data pada sistem informasi/ website untuk meminimalisir terjadinya hacker atau peretasan 2. Melakukan Koordinasi dan Penanganan bersama Dinas Kominfo DIY apabila terjadi serangan hacker 3. Melakukan Pengecekan Infrastruktur Jaringan	Kegiatan Maintenance Sistem dan Infrastrukturnya	Triwulan 3 Tahun 2025	Pranata Komputer Ahli Pertama	Tidak Ada	Pemantauan Triwulanan
	c. pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi							Sistem Informasi belum sesuai dengan rekomendasi Dinas Kominfo DIY	Kesalahan input data sumber (sourcecode) oleh petugas penginput	Rencana dan Anggaran, Keamanan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan	adanya salah saji output laporan Sistem Informasi	Reputasi serta Hukum dan Regulasi	Hosting dan Domain bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	4	Frekuensi kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun, Sering Terjadi, $4 \leq X \leq 5$ kali	1	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) ≤ 10	6	Rendah	Tidak	3	Mitigasi	Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kominfo DIY terkait rekomendasi investasi TIK meliputi pembuatan/pengembangan sistem informasi serta pengadaan perangkat keras TIK	Rekomendasi	Tahun 2025	Kepala Dinas	Tidak Ada	Pemantauan Triwulanan
Periode Waktu	1 Januari - 31 Desember 2025																											

Yogyakarta,

5

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY



ANNA RINA HERBRANTI.ST.,MT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

CASCADING RPJMD PROVINSI DIY PERIODE 2022-2027
PERANGKAT DAERAH : DINAS PUPESDM DIY

No	RPJMD							RENSTRA OPD					Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program (Ya/Tidak)	Sektor Unggulan Pemda (Ya/Tidak)	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, dan Kasus Hukum	Isu Terkini	Terkait Langsung dengan Tujuan/ Sasaran RPJMD (Ya/Tidak)	Layanan Publik (Ya/ Tidak)	Hajat Hidup Orang Banyak (Ya/ Tidak)
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terwujudnya kualitas hidup kehidupan masyarakat	a. Indeks Pertumbuhan Inklusif/ Inclusive Growth Index (IGI) b. Indeks Kebahagiaan	1. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	Program Pemerataan Kesejahteraan	a. Indeks Gini b. Persentase Desa Mandiri	DPUPESDM DIY	Tujuan : Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral Sasaran: 1. Rumah Tangga yang menempati hunian layak 2. Rumah Tangga Berakses Listrik 3. Penduduk Berakses Air Minum 4. Penduduk Berakses Sanitasi 5. Penyediaan infrastruktur sumber daya air 6. Peningkatan aksesibilitas Jalan 7. Peningkatan kinerja jasa konstruksi 8. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah 9. Meningkatnya kesesuaian perusahaan pertambangan terhadap pola ruang 10. Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman	Sasaran 1 : Rumah Tangga yang menempati hunian layak Indikator 1 : Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana b. Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Rp 130.000.000	Ya	Ya	1.Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan 2. Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up) 3. Paket Pengadaan menghindari tender 4. Risiko pengadaan fiktif 5. Manipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa 6. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan	Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. D.I Yogyakarta diamankan Penyediaan akses bagi rumah tangga untuk menempati hunian layak menjadi 87,6% rumah tangga di dalam RPJMN.	Ya	Ya	Ya
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Good Governance	a) Opini BPK b) SAKIP c) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) b) Indeks SPBE	DPUPESDM DIY			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP	Rp 4.915.000.000	Ya	Ya	1.Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan 2. Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up) 3. Paket Pengadaan menghindari tender 4. Risiko pengadaan fiktif 5. Manipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa 6. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan		Ya	Ya	Ya
4	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang	a) Perwujudan pola ruang b) Capaian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	DPUPESDM DIY		Sasaran 2 : Rumah Tangga Berakses Listrik Indikator 2 : Persentase rumah tangga berakses listrik	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	Rp 86.723.000	Ya	Ya	1.Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan 2. Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up) 3. Paket Pengadaan menghindari tender 4. Risiko pengadaan fiktif 5. Manipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa 6. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan	Peningkatan kebutuhan listrik perkotaan tidak diiringi dengan diversifikasi sumber penyediaan listrik sehingga berpotensi semakin menurunkan mutu lingkungan mengingat sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan sumber energi fosil.	Ya	Ya	Ya
										PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	a. Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan b. Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	Rp 45.000.000	Ya	Ya	1.Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan 2. Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up) 3. Paket Pengadaan menghindari tender 4. Risiko pengadaan fiktif 5. Manipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa 6. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan		Ya	Ya	Ya

No	RPJMD							RENSTRA OPD					Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program (Ya/Tidak)	Sektor Unggulan Pemd (Ya/Tidak)	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, dan Kasus Hukum	Isu Terkini	Terkait Langsung dengan Tujuan/ Sasaran RPJMD (Ya/Tidak)	Layanan Publik (Ya/ Tidak)	Hajat Hidup Orang Banyak (Ya/ Tidak)
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									Sasaran 3 : Penduduk Berakses Air Minum Indikator 3 : Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional	Rp 11.540.352.000	Ya	Ya	1.Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan 2. Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up) 3. Paket Pengadaan menghindari tender 4. Risiko pengadaan fiktif 5. Manipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa 6. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan	1. Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman. Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Target RPJMN akses air minum layak sebesar 100% di DI Yogyakarta. Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, selain dukungan pembiayaan dari pemerintah perlu dirumuskan kebijakan yang menyeimbangkan penyediaan air minum sebagai hak dasar (domestik) dan non domestik. Diharapkan dari pelanggan non domestik dapat meningkatkan minat investasi dari badan usaha serta layanan kepada pelanggan domestik.	Ya	Ya	Ya
										PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional	Rp 968.000.000	Ya	Ya	1.Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan 2. Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up) 3. Paket Pengadaan menghindari tender 4. Risiko pengadaan fiktif 5. Manipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa 6. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan	2. Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman. Persentase perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi (9,36 persen atau setara 25 juta jiwa) dan menyebabkan Indonesia berada di peringkat 3 dunia untuk angka BABS di tempat terbuka. Sementara itu, operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 36,3 persen kapasitas yang masih IPAL dapat dimanfaatkan. Sistem	Ya	Ya	Ya
										PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengurangan luasan genangan	Rp 235.600.000	Ya	Ya	1.Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan 2. Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up) 3. Paket Pengadaan menghindari tender 4. Risiko pengadaan fiktif 5. Manipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan	Operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 36,3 persen kapasitas yang masih IPAL dapat dimanfaatkan. Sistem	Ya	Ya	Ya
									Sasaran 5 : Penyediaan infrastruktur sumber daya air Indikator 5 : Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	a. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari b. Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan	Rp 17.081.360.750	Ya	Ya	1.Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan 2. Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up) 3. Paket Pengadaan menghindari tender 4. Risiko pengadaan fiktif 5. Manipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa 6. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas. Di sisi lain, belum meratanya distribusi air menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan atas air tanah di beberapa wilayah. Ekstraksi air tanah memiliki porsi sebesar 46 persen dari pemenuhan kebutuhan air domestik. Penggunaan air tanah di beberapa wilayah perlu diperhatikan.	Ya	Ya	Ya
										PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Meningkatnya ketersediaan air baku	Rp 3.247.400.000	Ya	Ya	1.Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan 2. Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up) 3. Paket Pengadaan menghindari tender 4. Risiko pengadaan fiktif 5. Manipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa 6. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan		Ya	Ya	Ya

No	RPJMD							RENSTRA OPD					Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program (Ya/Tidak)	Sektor Unggulan Pemda (Ya/Tidak)	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, dan Kasus Hukum	Isu Terkini	Terkait Langsung dengan Tujuan/ Sasaran RPJMD (Ya/Tidak)	Layanan Publik (Ya/ Tidak)	Hajat Hidup Orang Banyak (Ya/ Tidak)
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
										PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik	Rp 9.000.000.000	Ya	Ya	1.Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan 2. Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up) 3. Paket Pengadaan menghindari tender 4. Risiko pengadaan fiktif 5. Memanipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa 6. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan		Ya	Ya	Ya
								Sasaran 6 : Peningkatan aksesibilitas Jalan Indikator 6 : Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kemandapan jalan	Rp108.962.568.191	Ya	Ya	1. Dinas PUPESDM DIY belum melaksanakan koordinasi dengan OPD dan Stakeholder terkait penyusunan rencana aksi penetapan kelas jalan provinsi. 2. Dinas PUPESDM DIY belum sepenuhnya menyusun perencanaan teknis pembangunan serta preservasi jalan secara memadai 3. Dinas PUPESDM DIY belum menyusun dan menetapkan pedoman dan standar teknis berdasarkan norma, standar, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan jalan yang ditetapkan Menteri serta belum sepenuhnya mengimplementasikan pedoman dan standar teknis yang ditetapkan Kementerian PUPR 4. Penyusunan program dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan pada Pemda DIY belum sepenuhnya memadai 5. Dinas PUPESDM DIY belum sepenuhnya menyusun perencanaan teknis	Ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,3 jam per 100 km	Ya	Ya	Ya	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	Rp139.482.419.800	Ya	Ya		Ya		Ya		Ya	Ya
								Sasaran 7 : Peningkatan kinerja jasa konstruksi Indikator 7 : Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara	Rp 600.000.000	Ya	Ya	1.Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan 2. Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up) 3. Paket Pengadaan menghindari tender 4. Risiko pengadaan fiktif 5. Memanipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa 6. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan	1. Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Provinsi belum seluruhnya diperiksa keandalannya. 2. Pelaksanaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan Provinsi belum dilaksanakan secara optimal.	Ya	Ya	Ya	

No	RPJMD							RENSTRA OPD					Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program (Ya/Tidak)	Sektor Unggulan Pemd (Ya/Tidak)	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, dan Kasus Hukum	Isu Terkini	Terkait Langsung dengan Tujuan/ Sasaran RPJMD (Ya/Tidak)	Layanan Publik (Ya/ Tidak)	Hajat Hidup Orang Banyak (Ya/ Tidak)
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
										PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	a. Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi b. Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan	Rp 574.028.000	Ya	Ya	1.Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan 2. Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up) 3. Paket Pengadaan menghindari tender 4. Risiko pengadaan fiktif 5. Manipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa 6. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan	3. Penyediaan tenaga konstruksi (tenaga ahli dan terampil) yang bersertikasi belum memenuhi kebutuhan pasar. 4. Penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada sistem informasi pembina jasa konstruksi belum dilaksanakan dengan optimal dengan ketersediaan informasi yang selalu terkini	Ya	Ya	Ya
										PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi	Rp 1.250.000.000	Ya	Ya	1.Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan 2. Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up) 3. Paket Pengadaan menghindari tender 4. Risiko pengadaan fiktif 5. Manipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa 6. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan		Ya	Ya	Ya
								Sasaran 8 : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Indikator 8 : Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 53.477.364.226	Ya	Ya	1. Penggelapan dana retribusi 2. Pembayaran tidak sah 3. Pengambilan uang secara tidak sah 4. Perencanaan pengadaan Aset dan Persediaan tidak sesuai kebutuhan 5. Penggunaan aset dan persediaan OPD secara tidak sah untuk kepentingan pribadi pegawai/pejabat OPD 6. Penyalahgunaan/ penggelapan aset OPD	Efisiensi dan efektifitas proses bisnis dan tata laksana penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Bidang Energi Sumber Daya Mineral	Ya	Ya	Ya	
								Sasaran 9 : Meningkatnya kesesuaian perusahaan pertambangan terhadap pola ruang Indikator 9 : Persentase perusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	Rp 803.448.125	Ya	Ya	1.Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan 2. Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up) 3. Paket Pengadaan menghindari tender 4. Risiko pengadaan fiktif 5. Manipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa 6. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan 7. Kecurangan (Fraud) dalam penyusunan laporan keuangan. 8. Manipulasi data laporan kinerja	Peningkatan kebutuhan listrik perkotaan tidak diiringi dengan diversifikasi sumber penyediaan listrik sehingga berpotensi semakin menurunkan mutu lingkungan mengingat sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan sumber energi fosil.	Ya	Ya	Ya	

No	RPJMD							RENSTRA OPD					Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program (Ya/Tidak)	Sektor Unggulan Pemda (Ya/Tidak)	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, dan Kasus Hukum	Isu Terkini	Terkait Langsung dengan Tujuan/ Sasaran RPJMD (Ya/Tidak)	Layanan Publik (Ya/ Tidak)	Hajat Hidup Orang Banyak (Ya/ Tidak)
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									<p>Sasaran 10 : Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman</p> <p>Indikator 10 : Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah</p>	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Pengendalian Pengusahaan Air Tanah	Rp 70.000.000	Ya	Ya	<p>1. Penerbitan Rekomendasi Teknis Sub urusan air tanah dan geologi sesuai permintaan pemohon/ pihak tertentu</p> <p>2. Penghitungan NPA yang digunakan sebagai dasar penentuan besaran Pajak Air Tanah dikurangi</p> <p>3. Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan</p> <p>4. Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark- up)</p> <p>5. Paket Pengadaan menghindari tender</p> <p>6. Risiko pengadaan fiktif</p> <p>7. Manipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa</p> <p>8. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan</p>		Ya	Ya	Ya

Yogyakarta,
KEPALA,



ANINA RINA HERBRANTI,
NIR. 197106241998032002

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)			Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian						STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)			Rencana Pemantauan		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Nilai Risiko		Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
b	Rumah Tangga Berakses Listrik	Persentase rumah tangga berakses listrik	Pencapaian rasio elektrifikasi <100%	RSO 24.02	Kepala Dinas	Terdapat masyarakat yang menolak akses listrik dengan alasan tertentu yaitu : 1. penganut aliran kepercayaan, penderit ODGJ dan lanjut usia	Eksternal	UC	1. Listrik sebagai salah satu kebutuhan dasar suatu rumah tangga, belum terpenuhi 2. Menghambat upaya pengurangan angka kemiskinan	Masyarakat	1. Kegiatan pemberian bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga 2. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi data rumah tangga belum berlistrik 3. Pendekatan langsung kepada sasaran, pendekatan/koordinasi dengan pihak kalurahan 4. Koordinasi dengan PLN terkait kebutuhan perluasan jaringan dan peningkatan kapasitas listrik	2	3	6	Masyarakat menolak akses listrik yang diberikan atas dasar keinginan sendiri	1. Koordinasi updating data rumah tangga belum berlistrik dengan Kabupaten/Kota dan PLN 2. Sosialisasi dan pendekatan persuasif dengan melibatkan kelurahan, tetangga dan keluarga terdekat	Kepala Dinas	Tahun Anggaran	Rapat koordinasi dan kunjungan lapangan	DPUPESDM DIY, PT. PLN (persero)	Masyarakat	2	2	4	Monitoring dan evaluasi perkembangan akses listrik bagi masyarakat	Kepala Dinas	3 bulan sekali
c	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Target akses air minum layak tidak tercapai	RSO 24.03	Kepala Dinas	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pendanaan oleh kabupaten/kota untuk meningkatkan akses air minum	Eksternal	C	Rendahnya peningkatan akses air minum aman	Masyarakat	Adanya target RPJMN untuk meningkatkan akses air minum	3	3	9	anggaran yang terbatas oleh Kabupaten/kota untuk meningkatkan akses	Koordinasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk peningkatan penyelenggaraan air minum aman	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran	Rapat koordinasi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas PUPESDM DIY	2	2	4	Sinkronisasi data dengan Kabupaten/Kota	Kepala Dinas	akhir tahun berjalan
d	Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	Target akses sanitasi layak tidak tercapai	RSO 24.04	Kepala Dinas	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pendanaan oleh kabupaten/kota untuk meningkatkan akses sanitasi	Eksternal	C	Rendahnya peningkatan akses sanitasi aman	Masyarakat	Adanya target RPJMN untuk meningkatkan akses sanitasi	3	3	9	anggaran yang terbatas oleh Kabupaten/kota untuk meningkatkan akses	Koordinasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk peningkatan penyelenggaraan sanitasi aman	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran	Rapat koordinasi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas PUPESDM DIY	2	2	4	Sinkronisasi data dengan Kabupaten/Kota	Kepala Dinas	akhir tahun berjalan
e	Penyediaan infrastruktur sumber daya air	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	Krisis air baku air bersih terutama selama musim kemarau baik secara kuantitas maupun kualitas	RSO 24.05	Kepala Dinas	Jumlah infrastruktur, daya tampung, sarana dan prasana air baku tidak terpenuhi sesuai kebutuhan	Eksternal	C	Rendahnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat	Pemeliharaan rutin dan berkala infrastruktur sumber daya air eksisting dan tata pengaturan air/tata kelola air yang efektif dan efisien	3	3	9	meningkatnya potensi konflik air, kurang optimalnya irigasi	Rakor dengan Dinas PUPRKP Kabupaten/Kota dan BBWS terkait sinergisitas program penyediaan infrastruktur sumber daya air	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran	Rapat dan/atau Surat Edaran	BBWS SO dan Dinas PUPESDM DIY	Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Pemerintah Kota Yogyakarta	3	2	9	Laporan/notulensi pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester 1
f	Peningkatan aksesibilitas Jalan	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	Adanya perbedaan rencana dan realisasi target pada paket pembangunan yang bersumber dana APBN	RSO 24.06	Kepala Dinas	Kebijakan pada Pemerintah Pusat	Eksternal	C	Capaian kinerja tidak sesuai yang ditargetkan	Pemda DIY	Berkoordinasi dengan OPD Pusat secara rutin	3	4	12	ketidak updatean informasi terkait jadwal rencana pembangunan oleh nasional/ potensi hambatan di lapangan	Sinkronisasi data dengan Pusat	Kepala Dinas	Akhir triwulan di tahun berjalan	Rapat koordinasi	Satker P2JN DIY, Dinas PUPESDM DIY	Satker P2JN DIY, Dinas PUPESDM DIY	2	2	4	Sinkronisasi data dengan Pusat	Kepala Dinas	akhir triwulan di tahun berjalan
g	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	Pelatihan Tenaga Ahli konstruksi yang sebanyak 200 orang (5angkatan) tidak diikuti dengan kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang hanya sebanyak 80 orang (2 angkatan) sehingga mengurangi minat peserta untuk mengikuti pelatihan	RSO 24.07	Kepala Balai	Kewenangan uji kompetensi/sertifikasi berada di luar SKPD	Eksternal	C	Pelaksanaan mundur dari jadwal, target jumlah peserta tidak terpenuhi	Masyarakat	Koordinasi awal, respon cepat setelah kebijakan ditetapkan	3	2	6	Target peserta pelatihan tenaga ahli yg tidak terpenuhi karena sedikit peminat	Koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terbit dan penambahan kuota fasilitasi sertifikasi tenaga ahli	Kepala Dinas	Tahun Anggaran	Sosial Media, Pertemuan Langsung, whatsapp	BPALPJK	Masyarakat Jasa Konstruksi	3	2	6	Terlaksananya acara dengan lancar	Kepala Dinas	akhir tahun berjalan
			Kegiatan survei di banyak lokasi dengan SDM yang terbatas		Kepala Dinas	kegiatan tidak selesai tepat waktu	Eksternal	C	penerbitan analisis perkiraan biaya bangunan gedung negara tidak sesuai target waktu yang ditentukan	Pemda DIY	Melaksanakan optimalisasi survey dengan SDM dan waktu yang ada	3	3	9	rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan gedung negara tidak selesai tepat waktu	menambah personil survey dalam rangka penerbitan surat rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan gedung negara	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran	Rapat koordinasi	Dinas PUPESDM DIY	OPD Pemda DIY	2	2	4	Koordinasi dengan OPD Pemda DIY	Kepala Dinas	tahun berjalan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)			Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian						STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)			Rencana Pemantauan		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Nilai Risiko		Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(13)x(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
h	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi Dinas PUPESDM DIY rendah	RSO 24.08	Kepala Dinas	Kurang optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas	Eksternal	C	Rendahnya Nilai Reformasi Birokrasi Dinas	Pemda	Monev pelaksanaan reformasi birokrasi dinas	2	3	6	Pelaksanaan budaya kerja satria belum optimal	Melakukan Sosialisasi dan monev pelaksanaan budaya kerja satria	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran	Rapat Koordinasi	Dinas PUPESDM DIY	Biro Organisasi	1	2	2	Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
i	Meningkatnya kesesuaian pengusahaan pertambangan terhadap pola ruang	Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	Pengusahaan pertambangan di dalam kawasan peruntukan pertambangan dan sesuai dengan pemanfaatan ruang	RSO 24.09	Kepala Dinas	1. Terdapat kegiatan penambangan tanpa izin 2. Terdapat kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan	Eksternal	C	Penurunan kualitas lingkungan dan potensi adanya konflik dengan masyarakat dan antar masyarakat	Masyarakat dan lingkungan	1. Pembinaan pengusahaan kegiatan pertambangan 2. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan	3	5	15	Pelaku kegiatan pertambangan tidak mengindahkan himbauan/peringatan dari aparat pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian	koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan dengan OPD terkait dan aparat penegak hukum serta upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum dilakukan lebih masif	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran	Rapat Koordinasi	DPUPESDM, DPMPSTP, DPTR, DLHK, BBWS SO	Masyarakat dan pelaku kegiatan pertambangan	2	3	6	Monitoring dan evaluasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan	Kepala Dinas	3 bulan sekali
j	Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman	Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah	Rerata penurunan muka air tanah di atas 20%	RSO 24.10	Kepala Dinas	Terdapat peningkatan aktivitas pengusahaan air tanah berlebihan yang tidak sesuai arahan zona konservasi	Eksternal	C	Penurunan status zona konservasi air tanah menjadi rawan	Masyarakat	1. Pembinaan pengusahaan air tanah kepada badan usaha 2. Monitoring dan evaluasi fluktuasi muka air tanah 3. Pengendalian pemanfaatan zona konservasi air tanah 4. Kajian review neraca air tanah 5. Inventarisasi dan evaluasi rasio volume NPA oleh badan usaha dibandingkan dengan cadangan dinamis	3	5	15	Kewenangan perizinan air tanah yang berada di pemerintah pusat sehingga adanya ketidaksesuaian pemanfaatan zona konservasi tidak dapat ditindaklanjuti secara langsung serta belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan air tanah tanpa izin	Koordinasi pembinaan dengan Badan Geologi selaku pemerintah pusat yang memiliki kewenangan perizinan dan pengelolaan air tanah dan mendorong Badan Geologi segera membentuk regulasi bagi pemanfaatan air tanah belum berizin	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran	Workshop/Klinik Perizinan/Email	Badan Geologi	Masyarakat Pelaku Pengusahaan Air Tanah	2	3	6	Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah rutin setiap bulan	Kepala Dinas	Setiap Bulan Januari s.d Desember

